



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI X DPR RI
DENGAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI RI**

Tahun Sidang	:	2021 - 2022
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Kamis, 2 Juni 2022
Waktu	:	16.39 WIB s.d. 19.32 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta
Ketua Rapat	:	Agustina Wilujeng Pramestuti, SS.,M.M. (F-PDiP)
Sekretaris Rapat	:	Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Acara	:	Membahas RKA-KL & RKP K/L Tahun 2023
Hadir	:	PIMPINAN : <ol style="list-style-type: none">1. H. Syaiful Huda (F-PKB)2. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudin, MPP (F-Golkar)3. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS.,M.M. (F-PDI P)4. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. (F-Demokrat)5. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM. (F-PKS)

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. dr. Sofyan Tan
2. Putra Nababan
3. H. Arwan Aras T., S.Kom.
4. Puti Guntur Sukarno, S.IP.
5. M.Guruh Sukarno Putra
6. Rano Karno.,S.IP.
7. Dr. Andreas Hugo Pareira
8. Dra. Adriana Charlotte Dondokambey, M.Si.
9. Vanda Sarundajang

F-P. GOLKAR :

1. Ferdiansyah, SE., M.M.
2. H. Muhammad Nur Purnamasidi
3. Dr.Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si.
4. Adrian Jopie Paruntu

5. Robert Joppy Kardinal, SAB

F-P.GERINDRA :

1. Ali Zamroni, S.Sos
2. Ir. H. Nuroji
3. Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin
4. Martina, S.I.Kom., M.Si
5. Elnino M. Husein Mohl, S.T., M.Si.

F-P.NASDEM :

1. Ratih Megasari Singkaru, M.Sc.
2. Lestari Moerdijat, SS., MM.
3. M.Syamsul Luthfi
4. Dra. Hj. Tina Nur Alam, M.M.
5. Eva Stevanny Rataba
6. Moh. Haerul Amri, SP.

F-PKB :

1. Dr. H. Muhammad Kadafi, SH., M.H.
2. H. An'im Falachuddin Mahrus
3. Drs.H.Bisri Romli.,M.M.
4. Muh. Hassanudin Wahid
5. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

F-P.DEMOKRAT :

1. A.S. Sukawijaya Alias Yoyok Sukawi
2. Ir. Bramantyo Suwondo, M.M.
3. Debby Kurniawan, S.Kom
4. Anita Jacoba Gah, S.E.

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi. T.
2. H. Mustafa Kamal, SS.
3. Dr.H.Fahmi Alaydroes, M.M., M.Ed.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
2. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.
3. Mitra Fakhruddin, MB, SP
4. Prof. Dr. Zainuddin Maliki Djamal, S.E.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, SE.
2. H. Rojih

UNDANGAN :

1. Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI / F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore dan,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadim Anwar Makarim yang kami hormati beserta,
Bu Sekjen, dan seluruh jajaran.

Kalau saya sebutkan satu persatu nanti malah keliru, *spelling* nya.

Puji syukur dan *Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, pada kesempatan ini, kami mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Kerja dengan Saudara Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Sekretariat melaporkan pada saat ini Rapat Kerja Komisi X ditandatangani oleh 48 Anggota dari 52 Anggota Komisi dan telah lebih dari separuh unsur Fraksi. Dengan demikian, kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (1) peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenhi.

Dengan mengucap, "*Bismillahirrahmanirrahim*" perkenankan membuka Rapat Kerja pada hari ini dan dapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(KETUA PALU 1 KALI)

(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.39 WIB)

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Agenda Rapat Kerja hari ini adalah pembahasan pendahuluan RKA K/L dan RKP Tahun Anggaran 2023. Apakah disetujui. Jika disetujui oleh forum pula, hari ini dilakukan penyerahan hasil Rapat Panja apa itu GTK, ya Pak ya? Siap ya. GTK PPPK kepada kementerian sebagai hasil dari pembahasan kita selama satu masa sidang yang lalu.

Apakah dua agenda ini disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Terima kasih.

Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati.

Sebelum Saudara Menteri menyampaikan paparan, dari meja Pimpinan mengingatkan kembali bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tugas Komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi.

Atas dasar Pasal yang telah kami tetapkan, maka Raker hari ini merupakan perwujudan atas amanat Undang-Undang tersebut. Rapat Kerja hari ini merupakan pembalasan pendahuluan RKP Kemendikbud Ristek RI pada tahun 2023. Dalam RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2023, pembahasan lebih intens akan kita laksanakan setelah Presiden RI menyampaikan nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2023 pada sidang Paripurna pada tanggal 16 Agustus Tahun 2022.

Tema rencana kerja pemerintah pada tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mencerminkan semangat menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal Pemerintah tahun 2023 diarahkan pada reformasi struktural, antara lain terfokus pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan reformasi birokrasi.

Namun, reformasi struktural yang akan dilaksanakan yang perlu disertai dengan penyusunan rencana kerja Pemerintah yang nyata, terukur kemajuannya, berkualitas dengan tetap memperhatikan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan nasional sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Seiring dengan meredanya kasus Covid-19, situasi transisi dari pandemi ke periode endemi dan normal baru menjadi momentum strategis bagi kita untuk meningkatkan aktivitas sosial dan produktivitas ekonomi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pembangunan bidang pendidikan seharusnya juga sudah menyiapkan kebijakan kenormalan baru bagi masyarakat pendidikan untuk hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 dan tetap memperhatikan segala aspek protokol kesehatan, rencana kerja pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan, semestinya telah disusun dengan memperhatikan kondisi kemunduran belajar atau *learning loss* peserta didik di seluruh jenis, di

seluruh jenjang dan jalur pendidikan, sebagai akibat penutupan sekolah dan perubahan belajar dari sekolah ke belajar dari rumah.

Kondisi mutu pendidikan sebelum pandemi, yang diukur beberapa lembaga cukup memprihatinkan dan saat ini terjadi, setelah terjadi pandemipun semakin memprihatinkan.

Penguatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan harus di rencanakan untuk pelaksanaan Pasal 31 Ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kewajiban Negara Membiayai Pendidikan Dasar.

Ketentuan ini kemudian ditetapkan melalui pengaturan wajib belajar 9 tahun tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, merupakan hak setiap siswa. Namun dalam implementasinya, kebijakan dan anggaran pendidikan di Kemendikbud Ristek RI ternyata dialokasikan untuk program wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah wajib belajar 9 tahun sudah menjadi tuntas, sehingga harus menambah menjadi wajib belajar 12 tahun.

Di sisi lain alokasi anggaran untuk wajib belajar 12 tahun belum bisa memastikan ketercapaian wajib belajar 9 tahun tersebut. Dalam perkembangan terkini Kemendikbud Ristek RI menyusun program kebijakan Merdeka Belajar yang diantaranya berisi tentang sekolah penggerak, GTK penggerak dan organisasi penggerak. Dalam pandangan kami, 3 program tersebut memiliki potensi mendiskriminasi peserta didik dan masyarakat yang secara konstitusi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Terkait program tersebut, dapat ditemukan beberapa data di mana terdapat siswa yang tinggal di 70 desa yang tidak memiliki aliran listrik seperti di Kotawaringin, Kalimantan Barat. Para siswa tersebut sejatinya juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesetaraan, dan keadilan dibandingkan dengan siswa penggerak, siswa yang diajar oleh para guru penggerak yang berada di sekolah penggerak.

Dan selanjutnya, kami akan menampilkan data realisasi Tahun Anggaran 2021 dan RAPBN Tahun Anggaran 2023, terkait ketiga program tersebut, bisa lihat di sana bahwa banyak sekali ya anggaran untuk itu dan kami berharap ini bisa ada keadilan bagi siswa-siswa yang, bagi siswa-siswa yang ada di tempat-tempat yang jauh, dan tidak teraliri listrik.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

RKP Kemendikbud Ristek RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan amanat Undang-Undang di bidang pendidikan dan kebudayaan, antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sisdiknas; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Pembukuan; dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Kebijakan terkait mutu, akses dan relevansi pendidikan dijabarkan dalam pokok-pokok perencanaan kerja Kemendikbud Ristek RI, di mana kebudayaan selanjutnya menjadi haluan dalam pembangunan pendidikan.

Dalam dokumen dan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang terkait di Kemendikbud Ristek Dikti, disampaikan secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2003, antara lain akan difokuskan untuk mendukung peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan, melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan melalui program beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, dan penajakan atau *student loan*.

Yang kedua, peningkatan kualitas Sarpras penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar melalui sinergi kebijakan belanja kementerian dan lembaga dan transfer daerah dalam percepatan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana.

Yang ketiga, penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *sains techno park*, program siap kerja dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut.

Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan post kinerja, program guru dan transformasi tata kelola guru.

Yang kelima, penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda atau Pemdes untuk membangun PAUD melalui optimalisasi APBD atau dana desa.

Meski pemerintah telah melakukan pemenuhan mandatori anggaran pendidikan 20% dari APBN sejak tahun 2009 dan anggaran pendidikan mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 6,09% per tahun. Namun, pembangunan bidang pendidikan masih menghadapi tantangan, antara lain berbagai macam program pemerintah untuk mempercepat pencapaian wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015, belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan rata-rata lama belajar sekolah tahun 2017 adalah 8,1 tahun, pada tahun 2020 mencapai 8,4 tahun. Itu data BPS tahun 2022.

Anggaran pendidikan yang secara konsisten sudah dialokasikan pemerintah melalui amanat konstitusi, hendaknya diikuti dengan formulasi penggunaan yang tepat sasaran dan tepat guna, serta dikelola secara lebih *prudent* dan efisien untuk menyiapkan, menyediakan, dan mengembangkan SDM unggul yang menjadi faktor penting menuju Indonesia tahun 2045.

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Sebelum mendengarkan penjelasan, paparan yang disampaikan oleh Saudara Menteri, dari meja Pimpinan Komisi X ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023. Pagu indikatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp80.157.800.000.000,- pagu indikatif ini apabila dibandingkan dengan pagu indikatif pada tahun 2021 mengalami kenaikan 6,74% dan kenaikan 9,68% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 dengan perbandingan sebagai berikut :

Pagu indikatif Kemendikbud Ristek RI tahun anggaran 2023 sebesar Rp80.157.800.000.000,- apabila dibandingkan dengan alokasi anggaran definitif Kemendikbud Ristek RI pada APBN tahun 2022 juga mengalami kenaikan dengan keterangan, pada tahun anggaran 2022 adalah Rp 72.994.908.331.000,- sedangkan untuk RAPBN tahun 2023 adalah Rp 80.157.800.000.000,-

Pagu indikatif Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebesar Rp80.157.800.000.000,- bersumber dari Rupiah murni 67,94 triliun. Penggunaan PNBPN 2,13 triliun, penggunaan BLU 7,15 triliun, pinjaman luar negeri 0,68 triliun dan SBSN sebesar 2,23 triliun.

Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah dibacakan sebelumnya arah kebijakan pendidikan secara umum difokuskan untuk penguatan pendidikan agar SDM Indonesia siap menghadapi revolusi industri 4.0. Untuk itu, perlu dijelaskan pokok-pokok yang menjadi fokus kebijakan anggaran pendidikan secara nasional dan arah kebijakan Kemendikbud pada tahun anggaran 2023.

Dalam Raker ini, Komisi X ingin mendapatkan penjelasan secara langsung dari Saudara Kemendikbud Ristek RI mengenai rencana dan anggaran tahun 2023. Dengan penjelasan nanti, kami mengharapkan setidaknya mengenai:

- a. Program-program prioritas Kemendikbud Ristek RI dengan argumentasinya berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif, serta bertujuan menyelesaikan permasalahan pendidikan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
- b. Skema anggaran fungsi pendidikan yang ada di Kementerian atau lembaga terkait pada RKP dan RKA K/L pada tahun 2023.
- c. Dasar penentuan target dan sasaran program-program prioritas Tahun Anggaran 2023, serta strategi realisasinya.
- d. Mengingat beberapa turunan pilihan kebijakan "Hal lain yang perlu kami tekankan adalah dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kemendikbud diharapkan menyajikan data peserta didik yang

berpotensi untuk *learning loss*, baik Merdeka Belajar yang belum memiliki landasan hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendikbud Ristek RI perlu menyampaikan evaluasi seluruh episode Merdeka Belajar, baik dari sisi anggaran maupun capaian terhadap tujuan pendidikan dan amanat konstitusi, sehingga dapat disajikan dalam momen ini.

Kami mengingatkan bahwa pembahasan pagu indikatif ini akan menjadi dasar RKP RKA K/L pada RAPBN tahun 2023, setelah dibacakannya nota keuangan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 di sidang Paripurna DPR. Hal lain yang perlu kami tekankan adalah dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kemendikbud diharapkan menyajikan data peserta didik yang berpotensi untuk *learning loss*. Baik jumlah per jenjang pendidikan maupun berbasis wilayah.

Dalam forum rapat ini juga, kami mengingatkan Kemendikbud Ristek RI untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan berdasarkan landasan hukum yang kuat, memiliki kajian akademik, disertai skema manajemen informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Bapak-Ibu, hadirin yang kami hormati.

Dengan pokok-pokok agenda Rapat Kerja hari ini, sebelum Saudara Mendikbud Ristek RI menyampaikan paparannya, kita perlu kesepakatan rapat akan kita laksanakan sampai pukul berapa, Bapak-Ibu?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Paling lama jam 6. Kan ada rapat lagi. Jam 6, jam 6, Bu.

KETUA RAPAT:

Jam 6. Bu Dekor jam 12. Jam 12 pagi maksudnya? Siang maksudnya?

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Jam 6 lah.

KETUA RAPAT:

Jam 18. Pak Fikri? Jam 9. Belum ada kesepakatan ini, masih ada 3. Apa perlu *voting*. Jam 7, jam 7 mulai lagi maksudnya?

Sementara kita jam 6, nanti kalau. Iya. Nanti kalau misalnya pendapat pertanyaan para Anggota kurang waktu, sambil berjalan sholat Magrib gitu ya, atau kita *break*. Kalau begitu, Pak Dadang diminta untuk memberi sinyal kepada Kepala Perpusnas, karena kita pasti akan mundur.

Iya, oke baik. Iya.

(RAPAT:SETUJU)

(KETUK PALU 1 KALI)

Kami persilakan Saudara Kemendikbud Ristek RI untuk menyampaikan paparannya.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi X.

Kami akan memaparkan sedikit informasi mengenai rapat, mengenai postur pagu indikatif daripada anggaran Kemendikbud Ristek tahun anggaran 2023. Langsung saja masuk halaman yang pertama.

Ya, sebagai garis besar seperti kita tahu, tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan melihat pada beberapa sasaran RKP tahun 2023 seperti: pertumbuhan ekonomi, rasio gini, penurunan MS emisi, tingkat kemiskinan dan lain-lain.

Dan tentunya, arah-arah kebijakan yang mengikuti target-target tersebut yang mendukung target tersebut, itu banyak sekali yang secara langsung terdampak oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sistem pendidikan. Seperti, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan, dan dengan penanggulangan pengangguran dengan peningkatan *this and job*. Ini semua adalah peran penting sistem pendidikan untuk mendukung arah-arah kebijakan pemerintah.

Berikut di tahun 2023, kita ada 5 pokok atau tema-tema arah kebijakan. Yang pertama adalah optimalisasi angka partisipasi pendidikan, ini yang terus berjalan. Kita terus mentransformasi kebijakan KIP dan KIPK kita, baik dari sisi administrasi, efisiensi dan juga untuk mencapai dampak mobilitas sosial yang lebih tinggi, seperti yang telah kita lakukan untuk KIPK baru saja tahun yang lalu.

Tentunya juga untuk PAUD, terus meningkatkan angka APK, afirmasi, pendidikan non-formal, vokasi, PT akademik dan AKM dan pendanaan pendidikan ya. Jadi ini adalah *on going* program kita untuk terus meningkatkan akses di sistem pendidikan kita.

Dan yang kedua adalah tema kedua, kualitas relevansi pendidikan. Di sinilah kebanyakan program fokus "Merdeka Belajar" kita berada, fokus kepada kualitas. Di sini, kita ada sekolah penggerak, yang tentunya akan

selalu menjadi fokus kita untuk menjadi pusat-pusat inovasi untuk bisa disebarkan ke sekolah-sekolah di sekitar mereka.

Kedua adalah "Kurikulum Merdeka". Pada saat ini secara sukarela 140.000 sekolah di Indonesia telah memilih untuk melaksanakan "Kurikulum Merdeka" tanpa dipaksa sama sekali. Ini merupakan hal yang cukup luar biasa dan memang perkiraan kami adalah tidak perlu kita dorong itu kurikulum, karena banyak guru-guru sudah melihat dan kepala sekolah sudah melihat *benefit* dari pada kurikulum yang jauh lebih fleksibel.

Digitalisasi pendidikan akan terus menjadi *effort* utama kita baik dan distribusi TIK ke seluruh sekolah-sekolah yang di dalam sejarah Indonesia belum pernah sebanyak ini jumlah TIK yang didistribusikan dan juga berbagai macam *platform-platform* digital yang disediakan secara gratis kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

Kita meluncurkan beberapa program siswa berprestasi dan tentunya pusat pendidikan, pusat talenta kita, menjadi salah satu pusat terpenting untuk menemukan bakat-bakat, bukan hanya prestasi akademik, tapi bakat talenta juga seperti musik, olahraga.

Assessment nasional yang telah sukses diluncurkan tahun ini. Tentunya itu menjadi fokus terus kita iterasi dengan rapor pendidikan yang baik. GTK penggerak, unit-unit kita di lapangan dan peningkatan kualitas mutu PPG, pra jabatan. Jadi, guru-guru baru kita, pabrik-pabrik guru kita yang akan kita tingkatkan kualitasnya dan juga kemitraan DUDI, terutama untuk pihak SMK.

Tema ketiga adalah riset dan inovasi pendidikan tinggi. Di sini kita punya berbagai macam program yang baik seperti sudah dikenal sangat baik di masyarakat.

Yang pertama adalah "Kampus Merdeka", salah satu program terpopuler sekarang di mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia, untuk terus mendorong MBKM, untuk terus mendorong magang dan studi independent di luar kampus.

Kedua adalah program tahun ini yang akan diluncurkan tahun ini dan dilanjutkan tahun depan adalah praktisi mengajar untuk membantu Universitas mendapatkan praktisi-praktisi untuk bisa menjadi dosen. Riset internasional, sinergi riset DUDI dan perguruan tinggi. Itulah makanya kita salah satu program tersukses kita *matching fun* yang berhasil menarik begitu banyak perusahaan dan industri mau investasi riset di Universitas kita dan tentunya peningkatan kualitas infrastruktur riset dan hilirisasi dari pada hasil penelitian tersebut. Jadi, itu adalah fokus kita di pendidikan tinggi dan riset.

Untuk kemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, tentunya partisipasi publik dalam BIPA ya, pengaturan bahasa Indonesia di internasional dan kegiatan kebudayaan lainnya, seperti yang baru saja kita lanjutkan, seperti jalur rempah yang baru saja diluncurkan dari Surabaya. Itu

akan terus kita kembangkan, perlindungan dan pengembangan budaya, dan diplomasi budaya dimana kita kan tahun depan karena Covid, *insya* Allah akan semakin mereda. Itu kesempatan kita untuk kembali di panggung dunia untuk menjalin diplomasi kebudayaan kita.

Dan yang tema terakhir adalah tata kelola Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya adalah inisiatif yang Bapak-Ibu di sini sangat tahu mengenai RUU Sisdiknas; kedua adalah sinkronisasi program pusat dan daerah dan sistem pemerintahan berbasis elektronik di mana begitu banyak *digital government* inisiatif yang kita lakukan di dalam dunia pendidikan yang kita luncurkan dan pengembangan *management* talenta, penguatan aparat dan pengawasan interen pemerintah, itu menjadi salah satu pilar terpenting dalam menguatkan tata kelola kita.

Berikut, pagu indikatif di tahun 2023 seperti yang Ibu Pimpinan tadi sebutkan adalah 80,15 triliun ya. Bapak-Ibu mohon diketahui bahwa dari 80,15 triliun itu yang benar-benar bisa digunakan untuk program, anggaran program itu yang rupiah murni non-operasional sebesar 49,79 triliun. Dari 49,79 triliun tersebut, yang sifatnya pendanaan wajib itu sebesar 44,53 triliun.

Apa itu maksudnya pendanaan wajib, ini adalah program-program yang *on going* seperti, program PIP, KIP, tunjangan guru, BOPTN, sertifikasi dan dan seterusnya. Jadi, ada banyak sekali program-program yang sifatnya adalah *on going* dan di bawah itu, ruang fiskal kita untuk benar-benar meluncurkan program prioritas "Merdeka Belajar", itu sekitar 5,26 triliun Rupiah.

Ya, jadinya banyak sekali persepsi bahwa anggaran Kemendikbud itu cukup besar, tapi sebenarnya realitanya untuk program transformasi pendidikan, yaitu "Merdeka Belajar" yang benar-benar bisa kita gunakan untuk program inovatif dan transformasi, itu sekitar 5,26 triliun. Jadi, ini mohon diketahui bahwa seperti sama setiap tahun kita selalu mengalami isu yang sama.

Berikut, ya ini untuk garis besar saja bahwa dari total kebutuhan anggaran kita di 2023, itu sebenarnya 88,159 triliun. Jadi pada saat ini, kami mengalami defisit dibandingkan dengan pagu indikatif sebesar sekitar sedikit diatas 8 triliun Rupiah. Ini adalah jumlah kekurangan anggaran kita dibandingkan dengan target kita, apa yang mau kita capai tahun depan ya, ada sekitar 91 miliar defisitnya di dalam program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Di program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan ada sekitar selisih atau kekurangan 1,154 triliun, di program kualitas pengajaran dan pembelajar, pembelajaran ada selisih atau kekurangan sekitar 2,94 triliun dan di program pendidikan tinggi ada selisih kekurangan sekitar 997 miliar, di program pendidikan dan pelatihan vokasi ada sekitar 1,984 triliun dan untuk program dukungan manajemen, kami ada selisih sekitar 833 miliar. Jadinya, ini mungkin delta dari pada pagu indikatif dan kebutuhan berdasarkan usulan dan target kami.

Untuk selanjutnya rincinya, saya akan persilakan Ibu Sekjen untuk memaparkan.

Terima kasih.

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Baik, Pak Menteri.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Pimpinan dan, Anggota Komisi X yang kami hormati.

Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan sesuai dengan permintaan Ibu Pimpinan, tadi bahwa Kemendikbud perlu menyampaikan juga data terkait dengan anggaran fungsi pendidikan untuk Kementerian lain yang terkait dan juga dana transfer daerah.

Kami sampaikan bahwa untuk pagu indikatif sampai sekarang belum ada informasi terkait dengan postur anggaran fungsi pendidikan, Ketua dan juga begitu dengan anggaran dana alokasi khusus. Baik fisik maupun fisik belum kami peroleh, jadi belum bisa kami paparkan, belum bisa kami informasikan pada kesempatan hari ini.

Berikutnya, kami melanjutkan paparan Bapak Menteri terkait dengan rencana program dan anggaran yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menurut program yang di dalamnya juga bisa dapat dilihat indikasi unit utama yang terkait.

Pertama terkait dengan program PAUD dan wajib belajar 12 tahun yang dilaksanakan oleh Sekjen dan Paudasmen, di sini di dalam di halaman 6 disampaikan terkait dengan program "Indonesia Pintar". Untuk saat ini masih hanya bisa dialokasikan sebagaimana alokasi pada tahun-tahun sebelumnya dengan target 17,9 juta dengan alokasi anggaran 9,67 triliun Rupiah.

Di samping itu, dialokasikan anggaran untuk anak-anak kita yang ada di luar negeri melalui Sekolah Indonesia Luar Negeri, kemudian ada juga program afirmasi untuk anak-anak dari daerah tertinggal dan sekaligus juga penguatan satuan pendidikan.

Untuk yang nomor 4 ini adalah untuk penyediaan layanan khusus pendidikan khusus, dan layanan khusus, termasuk diantaranya bantuan untuk satuan pendidikan di wilayah perbatasan seperti, di Malaysia. Anak-anak kita yang ada di ladang-ladang dibiayai menggunakan program ini.

Kemudian terkait dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kami sampaikan di dalam pagu di Sekretariat Jenderal juga ada aneka tunjangan

guru non-PNS, alokasinya menurun dari tahun lalu dari 8,47 triliun, menjadi 8,03 triliun. Kenapa anggaran tersebut menurun, karena sebagian dari guru non-PNS, beralih statusnya menjadi guru PPPK. Oleh karena itu, tunjangan profesinya bergerak berubah dari lokasi di pusat menjadi alokasi di dalam DAK non fisik.

Kemudian, ada program penguatan karakter yang masih programnya masih sama dengan tahun 2022. Kemudian juga kami laporkan terkait dengan penguatan *platform* digital yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri mengalami peningkatan. Karena banyak sekali *platform-platform* yang sedang disiapkan oleh Kemendikbud Ristek yang sekarang sudah mulai dijalankan dari *platform* rumah belajar, akun belajar dan termasuk juga di antaranya Merdeka Mengajar, Kampus Merdeka. Semuanya disiapkan melalui anggaran tersebut dan tambahan ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas *cloud* yang membutuhkan jumlah yang sangat meningkat.

Kemudian, alokasi terkait dengan pengembangan prestasi untuk beasiswa, Presiden juga di dalamnya. Dialokasikan tetap sama, 516 miliar tahun 2023.

Terkait dengan program kualitas pengajaran pembelajaran di Paudesmen, kami sampaikan alokasi anggaran untuk Program Sekolah Penggerak, kemudian juga satuan pendidikan yang melaksanakan program UKS, manajemen berbasis sekolah dan ekstra kurikuler.

Kami laporkan bahwa di situ sepertinya jumlah lembaganya itu sedikit, bukan jumlah satuan pendidikan, tetapi adalah Pemerintah Daerah yang terlibat, yang kami dampingi untuk memastikan bahwa program-program dan kebijakan Kemendikbud Ristek dapat dilaksanakan di daerah sampai dengan satuan pendidikan.

Kemudian juga di situ kita usulkan untuk program yang terkait dengan pelaksanaan assesmen nasional, bukan assesmen sendiri, tetapi merupakan pendampingan kepada Pemda untuk membantu proses penyiapan assesmen nasional untuk tahun berjalan dan juga untuk tindak lanjut hasil assesmen tahun 2022 ini.

Kami memang sekarang sedang merencanakan perubahan RUU Bapak-Ibu, untuk program ini, supaya lebih spesifik dan kami mengusulkan untuk perubahannya menjadi program untuk perencanaan berbasis data.

Kemudian juga di Pauddasmen, ada program untuk penerapan digitalisasi sekolah. Itu juga merupakan pendampingan kepada Pemda untuk memastikan, khususnya satuan pendidikan yang mendapatkan TIK melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, ini bisa betul-betul menggunakan anggarannya untuk yang lebih baik lagi.

Kemudian halaman berikutnya, halaman 9. Untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran di Badan Standardisasi, kurikulum dan

assesmen pendidikan. Alokasinya untuk kurikulum dan perangkat pembelajaran masih sama. Kami mengusulkan ada tambahan sedikit untuk pelaksanaan asesmen pendidikan dan akreditasi.

Kami sampaikan bahwa untuk saat ini jumlah sekolah yang belum pernah diakreditasi 1 tahun pendidikan, maksud saya, karena termasuk juga pendidikan Paud dan pendidikan non formal lainnya. Ada 106.000 yang belum terakreditasi. Jika pelaksanaan tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya target bisa terpenuhi pun masih ada sekitar 46.000 *backlog* satuan pendidikan yang harus diakreditasi di tahun 2023.

Kemudian kami laporkan juga di BSKAP juga dilakukan untuk penguatan terkait dengan buku kurikulum dan juga buku umum yang akan digunakan untuk meningkatkan kinerja, peningkatan kegiatan literasi di satuan pendidikan.

Kemudian untuk berikutnya di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, kami laporkan Bapak dan Ibu sekalian, alokasi tahun 2023 di dalam Pagu Indikatif sudah kami tingkatkan cukup banyak untuk program GTK penggerak, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi, sehingga kami masih mengusulkan tambahan 75.000 orang dengan alokasi tambahan sebesar Rp1 triliun.

Bapak dan Ibu, juga kami sampaikan bahwa di dalam usulan tambahan 2022, kami sudah mengusulkan adanya peningkatan alokasi untuk Guru Penggerak dan juga kegiatan-kegiatan lain terkait dengan Pendidikan Profesi Guru yang signifikan jumlahnya. Namun di dalam Pagu Indikatif jumlah usulan yang kami tambahkan di dalam tahun 2022 belum di hitung sebagai *baseline* di dalam perhitungan Pagu Indikatif. Sehingga usulan tambahan untuk Dirjen GTK di tahun 2023 memang masih cukup tinggi, termasuk untuk PPG pra jabatan, untuk sekolah penggerak, guru PPPK, dan juga organisasi penggerak.

Berikutnya terkait dengan pendidikan vokasi. Kami laporkan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023, dari mulai sertifikasi siswa SMK, alokasi Pagu Indikatif masih sama dengan tahun yang lalu tetapi kami mengusulkan sedikit tambahan di tahun 2023. Kemudian untuk tambahan yang cukup banyak adalah terkait dengan penguatan SMK sebagai pusat keunggulan dan SMK Industri 4.0 kami mengusulkan tambahan sekitar 993 miliar dari alokasi yang sudah ada di dalam Pagu Indikatif sebesar Rp743 miliar.

Kemudian satuan pendidikan yang melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, kami juga mengusulkan tambahan dari 37 miliar menjadi 61,88 miliar. Kegiatan lembaga kursus dan pelatihan juga kami tambahkan, kami usulkan untuk di tambahkan karena banyaknya kebutuhan alokasi kebutuhan pelatihan untuk mereka-mereka yang sedang tidak sekolah, anak-anak di luar sekolah membutuhkan banyak pelatihan.

Kami melaporkan bahwa untuk program kursus dan juga PKK dan PKW, ini sudah kita *link*-kan datanya, baik itu dengan Dapodik, data PDDikti, maupun juga data Dukcapil plus data kartu pra kerja. Jadi yang menerima alokasi anggaran adalah mereka-mereka yang memang tidak mendapatkan dukungan dari mana-mana dan itu ada datanya kami *link* dari dengan semua sistem informasi yang ada. Kemudian terkait dengan BOPTN untuk non penelitian masih sama kami usulkan sekitar 338 miliar.

Berikutnya masih tetap untuk vokasi. Kami laporkan bahwa Kami mengusulkan cukup banyak tambahan terkait dengan *upskilling* dan *reskilling*, termasuk juga untuk pelatihan kurikulum guru kejuruan.

Bapak dan Ibu sekalian.

Perlu diakui bahwa guru kejuruan memang masih banyak membutuhkan peningkatan kualitas untuk memastikan mereka bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Indikator kinerja utama SMK salah satunya adalah memastikan lulusan mendapatkan pekerjaan paling lama 1 tahun setelah mereka lulus dan sekarang angkanya masih cukup rendah, kami menginginkan bahwa dengan peningkatan kualitas guru dan pelatihan kurikulum, pembelajaran di SMK menjadi jauh lebih baik.

Kemudian terkait dengan BOPTN di penelitian di vokasi, *matching fund*, dan penerapan kurikulum *link and match* masih tetap kita usulkan. Meskipun di Pagu Indikatif sudah ditingkatkan anggarannya dari tahun lalu 155 miliar menjadi 205 miliar, kami masih mengusulkan tambahan sebesar 33 Miliar. Kita harapkan bahwa *matching fund* ini menjadi lebih banyak lagi dan faktanya memang banyak sekali industri yang tertarik/terlibat untuk melakukan kerja sama.

Berikutnya, kami juga melakukan uji kompetensi mahasiswa untuk pendidikan tinggi vokasi dan juga SDM pendidikan tinggi vokasi dan alokasinya juga sudah meningkat sedikit, tetapi kami masih membutuhkan tambahan anggaran supaya lebih banyak lagi mahasiswa dan SDM pendidikan vokasi mendapatkan peningkatan kualitas. *Competitive fund* ini diusulkan cukup banyak Bapak dan Ibu yang kami laporkan, dari 83,5 miliar tahun 2022, kita usulkan menjadi 156 di Pagu Indikatif dan sedikit tambahan lagi kami usulkan. Karena ada perubahan-perubahan di dalam satuan biaya sedikit, sehingga ada kebutuhan tambahan sekitar 13 miliar saja.

Kemudian terkait dengan rekomendasi pengembangan kelembagaan dan sumber daya pendidikan vokasi, kami juga masih tetap melaksanakan meskipun dengan anggaran yang tidak terlalu banyak.

Berikutnya terkait dengan program pendidikan tinggi, mungkin nanti ada satu halaman yang di tambahkan karena ada sedikit *typo error* di *paper* yang kami kirimkan yang sudah beberapa hari yang lalu.

Di sini kami sampaikan alokasi anggaran yang cukup besar tambahannya Bapak Ibu sekalian untuk KIP kuliah, karena memang dengan

adanya perubahan satuan biaya. Baik itu karena perbedaan program studi maupun karena kemahalan lokasi, sehingga biaya hidup mahasiswa yang mendapatkan bantuan KIP kuliah berbeda antara mereka yang tinggal yang sekolah di Jakarta, yang kuliah di Yogja, dengan mereka yang kuliah di daerah lain. Jadi hal itu meningkatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari 8,9 triliun tahun 2022 menjadi 11,3 triliun pada tahun 2023.

Kemudian untuk tunjangan dosen juga untuk dosen non PNS, terjadi peningkatan juga karena banyaknya dosen yang memiliki peningkatan pangkat dan jabatan dan dari 1,58 triliun alokasi tahun 2022 menjadi sekitar 1,79 triliun dan masih kita usulkan juga tambahannya sebesar 339 miliar untuk sekitar 55.000 orang.

Bapak dan Ibu sekalian.

Untuk revitalisasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri, kami sampaikan bahwa ini mayoritas berasal dari PHLN dan SBSN dan BLU dengan alokasi tahun lalu 4,29 triliun untuk Pagu Indikatif ini baru teralokasikan sekitar 3,57 triliun. Sehingga kami mengusulkan ada tambahan sekitar 657,8 miliar untuk 7 lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri.

Kemudian program "Kampus Merdeka", ini kami alokasikan di Pagu Indikatif untuk 54.000 orang dengan anggaran 927 miliar, untuk BOPTN penelitian termasuk juga didalamnya *competitive fund* dan *matching fund* alokasinya tahun tahun ini 2022 sebesar 2,15 triliun, untuk tahun depan alokasi 1,8 triliun. Kami laporkan juga bahwa kami juga memanfaatkan program-program yang melalui LPDP untuk pembiayaan program-program yang ada di pendidikan tinggi.

Kemudian untuk BOPTN non penelitian termasuk didalamnya revitalisasi LPTK, kita usulkan terjadi peningkatan dari 3,7 triliun menjadi 4,059 triliun. Untuk beasiswa kemitraan negara berkembang, ini masih karena situasinya juga masih dalam kondisi Covid, maka usulan kami tahun 2023 juga tidak banyak berubah sekitar 37,7 triliun, eh miliar maaf.

Kemudian terkait dengan program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Untuk bahasa kami laporkan usulan tahun 2023 kami usulkan ada penambahan, memang ada penurunan dari tahun 2022. Nah seperti perlindungan bahasa untuk Pagu Indikatif masih dialokasikan sekitar 69,6 dan kami mengusulkan ada tambahan sekitar 19,5 miliar. Untuk internasional sesi bahasa daerah dari alokasi sekarang sekitar 36,8 di Pagu Indikatif kami mengusulkan tambahan sekitar 32,5 miliar.

Program literasi, Bapak dan Ibu sekalian, masih sedikit alokasi yang bisa kami alokasikan dari Pagu Indikatif sebesar 16,6 dan usulan kami untuk ditambahkan sebesar 22,15 miliar. Namun demikian kami juga mengusulkan agar penyediaan buku, terutama buku bacaan bisa dialokasikan menggunakan DAK non fisik. Jadi selain alokasi yang ada di Badan Bahasa, kami sedang mengusulkan menu baru di dalam DAK, DAK fisik maksud saya DAK fisik, untuk memungkinkan untuk penyediaan buku bacaan, utamanya

untuk daerah-daerah tertinggal yang memang mereka tidak memungkinkan untuk mengakses layanan buku-buku *digital*.

Berikutnya untuk Dirjen kebudayaan dari program yang sama, program pemajuan dan pelestarian budaya dan kebudayaan. Kami sampaikan, anggaran yang sudah dialokasikan di dalam Pagu Indikatif untuk kegiatan event kebudayaan 283,84 miliar, kami masih mengusulkan tambahan sebesar 50 miliar. Karena banyak kegiatan-kegiatan baru yang dilakukan memang 2 tahun sekali dan kemarin tidak masuk di dalam hitungan *baseline* Pagu Indikatif.

Begitu juga untuk kegiatan pelayanan, maaf, fasilitasi dan pembinaan lembaga dan pemerintah desa, ini juga kami usulkan ditambahkan karena program-program penguatan desa adat perlu kita lakukan secara lebih massif lagi, banyak sekali desa-desa yang membutuhkan revitalisasi.

Kemudian kami laporkan juga terkait dengan fasilitasi dan pembinaan masyarakat, kelompok masyarakat juga kami tambahkan. Namun kami laporkan juga bahwa untuk tahun 2023, kita sudah memungkinkan menggunakan manfaat dari dana abadi kebudayaan yang sudah mulai ada penerimaannya tahun 2022 ini. Jadi selain berasal dari ini, kami juga sedang mengupayakan untuk dimungkinkan tambahan dana abadi kebudayaan.

Berikutnya untuk prasarana bidang kebudayaan tidak meningkat untuk Pagu Indikatif menurun dari 298 miliar menjadi 141 miliar. Namun kami mengusulkan tambahan yang cukup banyak untuk revitalisasi kawasan Candi Muaro Jambi. Kami laporkan bahwa tahun 2022 ini sudah dialokasikan untuk Muaro Jambi, tetapi pada waktu menghitung *baseline* Pagu Indikatif oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, alokasi untuk Muaro Jambi belum disediakan. Sehingga kami usulkan untuk ditambahkan karena Pak Presiden juga menghendaki Muaro Jambi ini segera terselesaikan di tahun 2023.

Kemudian terkait dengan penyelesaian pembangunan Museum Nasional dan pembenahan BLU Museum dan cagar budaya, kami juga mengusulkan tambahan sekitar 243 miliar.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Kami sampaikan bahwa sudah ada keputusan Kemenpan-RB untuk pengelolaan UPT baru yang merupakan konsolidasi dari semua museum dan juga cagar budaya termasuk Borobudur dan Sangiran. Rencananya UPT tersebut akan kami transformasi menjadi BLU untuk memudahkan pengelolaan. Jadi selama ini seperti misalnya Borobudur, mereka mendapatkan *revenue*, PT Taman mendapatkan *revenue*, tetapi tidak bisa digunakan untuk melakukan revitalisasi, revitalisasi tetap menggunakan anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbudristek. Sehingga dengan adanya BLU, kami berharap bahwa *revenue* yang diterima oleh BLU akan mudah dialokasikan untuk operasional maupun revitalisasi museum dan juga cagar budaya tersebut.

Berikutnya terkait dengan dukungan manajemen, beberapa ada perubahan besar seperti misalnya tata kelola satker dan UPT di GTK ada tambahan sekitar 234 miliar. Mengapa, karena di GTK ada UPT baru yaitu Balai Besar atau Balai Guru Penggerak, yang sebelumnya tidak ada dan ini merupakan banyak yang merupakan pengalihan dari BP PAUD Diknas. Jadi beralih fungsi menjadi UPT Balai Besar Guru Penggerak.

Kemudian ada usulan terkait dengan Sarpras UPT yaitu untuk Pauddasmen untuk Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, kemudian Badan Bahasa, ini kita akan usulkan untuk membangun UPT di Maluku dan Gorontalo karena memang belum punya bangunan, yang mereka gunakan sekarang masih numpang di sana-sini. Dan untuk pendidikan vokasi ini juga kita usulkan tambahan anggaran sebesar 216 miliar yang akan digunakan untuk penguatan 7 balai pelatihan vokasi.

Mudah-mudahan dengan peningkatan fasilitas yang ada di UPT-UPT tersebut maka layanan Kemendikbudristek di daerah bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami kembalikan ke Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):**

Terima kasih Bu Sekjen.

Demikian adalah paparan kami mengenai Pagu Indikatif dan juga kebutuhan anggaran di tahun 2023. Seterusnya saya kembalikan ke Ibu Pimpinan untuk diskusi, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara Menteri dan Bu Sekjen yang telah menyampaikan paparannya. Banyak sekali dan mungkin perlu waktu bagi kita untuk mempelajari.

Selanjutnya kami persilakan kepada para anggota Komisi X untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, saran, atas paparan dari Kementerian. Kita mulai dari Fraksi PDI Perjuangan, kenapa Kapoksi nggak ada Mas Putra?

Silakan di atur untuk para anggota 2 orang per Fraksi, 2 ya, silakan.

F-PDIP (PUTRA NABABAN):

Bang Andreas, baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam damai sejahtera untuk kita semuanya,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Selamat sore.

Pimpinan yang terhormat dan para anggota dan,
Saudara Menteri dan seluruh jajaran yang telah menyampaikan paparannya,
yang cukup lengkap dan banyak seperti yang disampaikan Pimpinan tadi.

Ini adalah pertemuan ketiga hari ini Mas Menteri, di Komisi X pada hari ini awannya gelap pekat, karena banyak sekali yang diturunkan anggarannya. Kalau lihat Kementerian Pendidikan ini agak kelihatan ada cerah-cerahnya sedikit gitu ya dan terutama ada beberapa hal yang saya harus langsung apresiasi dulu, sebelum memberikan masukan dan tentunya masukan detail akan kita sampaikan dalam konsinyering.

Utamanya terkait dengan KIP Kuliah, yang memang di lapangan betul-betul kita rasakan, termasuk di Jakarta Timur Dapil saya. Bagaimana kebutuhannya ini sangat diperlukan dan saya lihat ada kenaikan yang cukup signifikan ya dari 8, ini 8 triliun ini ya menjadi 11,3. Tapi tentunya ini kita berharap Mas Menteri, kejadian yang terjadi di IPB waktu itu kita harapkan tidak terjadi lagi, dengan seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap beasiswa yang diberikan kepada anak didik kita.

Untuk itu tentunya kita meminta agar apa namanya, pihak Kementerian betul-betul bisa berkoordinasi dengan Universitas sehingga KIP-K yang merupakan program kerja Pak Jokowi sejak 2014 lalu, itu betul-betul mendapat jalan tol di Universitas-Universitas tidak mendapatkan ada pengecualian, gitu ya. Jangan sampai KIP-K ini dianggap sebagai apa namanya ada di pinggiran atau ada di atau ada di jalur lambat.

Yang kedua tentunya ini kita juga mempertanyakan juga terkait dengan beasiswa unggulan, yang ini harusnya penting untuk mahasiswa Magister dan program Doktor yang saya lihat tidak ada di dalam program kerja Kementerian. Nah ini mungkin perlu dijelaskan.

Dan yang ketiga terkait dengan perguruan tinggi, saya apresiasi selama dua periode terakhir ini ada UKT. Nah ini suara UKT ini belum berhenti ini sampai sekarang ya, Uang Kuliah Tunggal, ini belum berhenti sampai sekarang. Ini mungkin juga bisa menjadi perhatian saudara menteri dan juga jajarannya.

Berikutnya terkait dengan ini apa namanya, program PAUD dan wajib belajar 12 tahun. Kalau saya lihat di sini peningkatannya tidak signifikan, hanya selisihnya 91 juta. Namun dari Badan Kajian DPR, saudara menteri, kami juga mendapat informasi bahwa meningkatnya indeks rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 itu hanya 58,54. Artinya rata-rata penduduk

Indonesia yang berusia 25 tahun hanya menempuh pendidikan tertinggi sampai kelas 2 SMP.

Nah ini ini menjadi catatan dari kami dari Badan Kajian DPR RI, menjadi perhatian kami ketika melihat apakah program kerja dan juga anggaran yang ada di tahun 2022 dan juga di 2023 berubah ya menjadi lebih lebih inovatif. Meskipun kalau dilihat anggarannya tidak banyak berubah. Nah ini yang tentunya akan kita dalami pada 2 hari ke depan terkait dengan PAUD dan juga hal-hal lain yang tadi kami sampaikan.

Itu aja Pimpinan, tadi saya dengar sudah bunyi-bunyi, atas waktunya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih terima kasih Pimpinan.

Seluruh anggota Komisi X yang saya hormati,
Pak Menteri, Bu Sekjen,
Serta seluruh Pimpinan Deputy Dirjen dan jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan IPTEK Teknologi yang saya hormati.

Dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perguruan tinggi maupun dengan masyarakat. Satu hal yang sangat menonjol yang kami tangkap di dalam diskusi-diskusi maupun Rapat Dengar Pendapat tersebut, yaitu ketimpangan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Itu terjadi baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya di sini soal keberpihakan kita melihat kepentingan pendidikan swasta ini di dalam konteks nasional.

Dan yang kedua juga berkaitan dengan daerah-daerah terutama perkembangan kemajuan pendidikan di luar Jawa, ya baik di bagian Barat maupun bagian Timur, juga di daerah-daerah yang kita tahu di daerah-daerah perbatasan, yang benar-benar mengalami kesulitan. Nah kalau saya perhatikan dari anggaran ini, ya rapat-rapat kami dengar pendapat atau yang selama ini kita bicarakan, kita belum sampai kepada upaya untuk menerobos keberpihakan tersebut Pak Menteri. Artinya bagaimana kita mencari jalan keluar untuk juga memberikan perhatian yang berimbang dengan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan swasta.

Saya kira ya mulailah kita mulailah dari tahun ini, kita memberikan porsi yang ya porsi yang seimbanglah, kalau tidak dikatakan seimbang, porsi yang lebih memberikan mereka juga harapan. Karena kalau kami dengar dari

apa teman-teman, baik yang dosen maupun pendidikan maupun para mahasiswanya. Ya mereka benar-benar mengalami kesulitan di dalam situasi ini dan ya kita juga tahu bahwa ya di dunia apalagi pendidikan tinggi. Jumlah dari mahasiswa swasta, perguruan tinggi swasta yang juga mendidik anak negeri kita tuh jauh lebih banyak secara persentase kuantitas, dibandingkan dengan mereka yang ada di negeri.

Kita tidak mau mengatakan bahwa yang di negeri itu harus di istimewa, tapi juga jangan sampai menganaktirikan yang di swasta. Nah sementara kalau kita lihat di dalam pembiayaan ini, tidak ada atau belum ada apa *political will* kita gitu dari bangsa ini gitu. Nah saya kira ini tentu pasti kita masih akan mengelaborasi, mengelaborasi ini di dalam bentuk apa, anggaran didapat dari Pagu Indikatif ini gitu. Tapi saya kira perlu juga kita mulailah memperhatikan memberikan perhatian lebih, termasuk dosen-dosen swasta di perguruan tinggi swasta. Yang hampir tiap kali kalau di dalam rapat dengar pendapat di sini selalu datang dengan keluhan-keluhan yang mereka sampaikan. Tapi terus terang, ya kami mendengar dan menyampaikan bahwa menjanjikan akan menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan Pak Menteri dan jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Sehingga saya pikir ini perlu menjadi suatu garis kebijakan besarlah Pak Menteri, saya tidak mau bicara belum bicara sampai yang detil-detil, tapi garis kebijakan besar bahwa ada keberpihakan dan itu muncul di dalam perencanaan-perencanaan anggaran nanti yang akan kita buat ini.

Saya kira itu Pak Menteri, apa hal umum, tapi saya kira ya itulah yang kedengaran yang sering kami dengar. Baik di daerah ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan kerja di daerah maupun ketika mereka datang ke sini. Saya kira itu hal yang saya kira perlu kami sampaikan pada kesempatan ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andreas.

PDI Perjuangan sudah 2, selanjutnya berikan kesempatan kepada Partai Golkar, silakan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Silakan kepada rekan-rekan, Kang Ferdy bersama Pak Nur, Pak Nur dulu. Eh pada juga. Kalau gitu 2 di bagi 3 ya waktunya ya.

F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Saya Bu duluan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Siapa duluan.

F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Kang Ferdi.

KETUA RAPAT :

Pak, Pak Nur dimana ya?

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Para anggota yang kami hormati dan,
Mas Menteri serta teman-teman dari pejabat Kementerian Kemendikbud.

Sedikit saja, ada beberapa yang kami sampaikan.

1. Kita minta kebijakan itu jangan menimbulkan diskriminasi,
2. Jangan menimbulkan dikotomi dan,
3. Harus ngerti tentang Indonesia.

Terkait dengan anggaran, ada beberapa hal kalau kita cermati halaman 5 dari 7 program yang diterima oleh Kemendikbud, dari halaman 5 sampai halaman 13 dan seterusnya, halaman 14. Itu ada beberapa catatan.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati.

Sekjen 9 kegiatan prioritas, Paudikdasmen 4 kegiatan prioritas, BSKAKP 7, GTK 5, vokasi 14, Badan Bahasa 3, kebudayaan 14, 6 non-lokasi. Nanti dijelaskan kok tidak disebutkan non-lokasi walaupun di situ masuk program pendidikan tinggi.

Yang jadi menarik, Kemendikbud mitra kita minta 8 triliun tapi begitu kami cermati sebenarnya tidak signifikan kebutuhannya dari selisih Pagu selisih Pagu indikator indikasi atau Pagu yang Indikatif tahun 2023. Yang ada yang kekurangannya agak melonjak itu di aneka tunjangan guru non-PNS, yang lain relatif kurang 2M,3M,4M,10M, jadi ini yang juga nanti perlu kita klarifikasi dalam Rapat Dengar Pendapat.

Terakhir, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan harus kita cermati adalah format ya. Dalam format ini indikatornya apa, *outcome*-nya apa, *ouput* mungkin sudah kaitan dengan sasaran, tapi *outcomen*-ya apa, indikatornya apa? Bahwa ini program berhasil, bahwa ini program gagal, nggak ada indikatornya. Sulit kita nanti ketika menyetujui anggaran, apa indikator-indikator keberhasilan tersebut.

Jadi izinkanlah melalui forum ini.

Bapak Ibu sekalian, Kepala Pimpinan yang kami hormati.

Tambahan anggaran bukan sekedar menambah sasaran tapi dampak yang harus juga kita ikuti seperti apa. Sehingga nanti Bu Irjen mengawasin ini juga enak, berhasil apa nggak karena Irjen kan tidak hanya *contact management*, termasuk juga Bu Irjen tolong Bu di Kemendikbud sudah PLT sudah 22 kan, 22 PLT loh. Nah terus gimana ngejawabnya Ibu nanti sebagai kaitan dengan surat edaran BAKN, 22 PLT di lingkungan Kemendikbud. Tolong saya dimohonkan klarifikasi kalau saya salah.

Terima kasih Pimpinan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Terima kasih Pak Ferdi.

Pak Sidot saya beri kesempatan Pak Nur dulu ya, silakan Pak Nur.

F-PG (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya terima kasih.

Pimpinan dan anggota Komisi X yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Yang pertama saya ingin membagi informasi terkait kesimpulan Rapat Kerja Banggar tanggal 19 Mei 2022. Poin 8 angka 8, meningkatnya belanja negara mengikat secara konvensional terhadap penambahan anggaran pendidikan, Banggar DPR RI menyetujui tujuan penambahan anggaran pendidikan sebesar 78,5 triliun. Sehingga anggaran pendidikan menjadi 621,3 triliun untuk memenuhi mandatori alokasi 20% anggaran pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan ini terdiri dari tambahan anggaran pendidikan pada belanja pemerintah pusat sebesar 30,6 triliun dan tambahan biaya pendidikan sebesar 47,9 triliun.

Setelah ini dibacakan, Bu Menteri Keuangan menyampaikan kalimat "Bahwa ini tidak otomatis masuk kepada Kementerian Pendidikan". Nah setelah itu, Pimpinan dan anggota mendebat itu, mendebat itu kemudian akhirnya ada catatan, catatan di nomor 1. Penambahan tersebut, penambahan pendidikan tersebut teralokasi 23,9 triliun agar digunakan untuk wajib belajar 12 tahun, *address*-nya jelas. Jadi tidak masuk K/L lain tapi masuk K/L ya memang yang dimandatorikan wajib belajar 12 tahun. Nah itu catatan dan itu disepakati sebagai bagian dari rapat kerja Banggar. Nah jadi sebenarnya kekurangan anggaran dengan catatan ini bisa di dipenuhi, itu satu informasi.

Yang kedua, Pak Menteri, ini aspirasi teman-teman disabilitas terkait KIP kuliah. Mereka agak keberatan dengan maksimal kelulusan 3 tahun untuk mendapatkan KIP kuliah karena mereka cacat tidak normal itu bukan pilihan mereka. Jadi menurut saya mungkin syarat KIP-Kuliah untuk disabilitas itu dikecualikanlah karena mereka bukan pilihan menjadi seperti itu,

tapi ini adalah bagian dari takdir hidup mereka. Karena itu kami berharap syarat KIP-Kuliah untuk disabilitas dikecualikan dari syarat yang bersifat reguler.

Nah itu mungkin itu saja, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nur.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar masih ada, Pak Sidot.

F-PG (DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.):

Terima kasih, karena waktunya terbatas juga ya harus menggunakan waktu dengan baik.

Yang saya hormati Pimpinan dan rekan-rekan anggota,
Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajaran.

Kami ini sebagai anggota nih kalau sudah ke Dapil bawa masalah yang luar biasa banyak terutama untuk pendidikan ini. Oleh karena itu kalau kami mengkomunikasikan atau menyampaikan masalah-masalah dengan Pak Menteri ya itulah tugas tanggung jawab kami sebagai anggota. Diantaranya keluhan dari para guru-guru yang sudah mengabdikan sekian puluh tahun tapi tidak lulus-lulus PPG ya.

Nah sehingga mereka juga tidak menikmati yang namanya tunjangan profesi guru itu. Nah ini sering disampaikan kepada mereka karena sulitnya mereka mengakses berbagai informasi bahan dan seterusnya karena mereka tinggal di daerah pedalaman perbatasan, sehingga mereka tidak dapat apa namanya, merasa sangat kesulitan mengakses semua itu karena jaringan internet tidak ada.

Kemudian yang kedua, terkait juga KIP-PIP mohon supaya prosedurnya juga lebih di sederhanakanlah. Kan banyak khususnya perguruan tinggi negeri seperti Universitas Tanjungpura yang menolak pengajuan dari anggota untuk KIP ini. Sehingga dampaknya juga kembali ke kami, orang tua mengatakan bahwa bohong itu Pak Adrianus itu katanya ada beasiswa, ada itu ini. Ya mungkin ya bagi yang lain efeknya nggak terlalu ini tapi bagi saya sebagai anggota, efek politisnya ya jelas besar sekali itu. Nah ini tolong nanti juga supaya pengajuan dari anggota itu jangan sampai tidak diperhatikan tapi kalau bisa ya tolong diprioritaskan.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, pengajuan izin operasional Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Ini terakhir kemarin kan ada verifikasi dari Dirjen Vokasi tentang Badan Pengelola Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan. Nah ini udah selesai, minggu yang lalu sudah

selesai. Saya mohon supaya kalau memang tidak ada masalah lagi Pak Menteri bisa segera menerbitkan SK operasionalnya ya, itu saja terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Baik, saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Hetifah.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Gerindra, silakan Pak Ali Zamroni.

F-GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Saya tidak terlalu panjang lebar, hanya ada 2 hal saja Pimpinan.

Pertama, terkait dengan Program Indonesia Pintar. Di mana di sini di anggarkan sekitar 9,6 triliun untuk sasaran 17,9 juta siswa ya. Tadi sekilas Pak Putra menyampaikan terkait dengan rata-rata lama sekolah di Indonesia kurang lebih 8,5 tahun kira-kira, belum mau ujian nasional dia *drop out*, kira-kira begitu. Kebetulan saya dari Dapil Banten 1, lewat Pandeglang pun tidak terlalu jauh 8,4 atau mendekati 8,5 tahun.

Nah dari apa yang saya sampaikan ini tentu sebenarnya kita bisa melakukan apa namanya improvisasi. Bahwa sasaran PIP (Program Indonesia Pintar) itu lebih banyak diberikan kepada siswa Sekolah Dasar, yang notabeneanya kalau dilihat dari rata-rata lama sekolah, itu rata-rata sudah terpenuhi ya. Kami mengusulkan bahwa sasaran itu dibalik untuk kemudian dibesarkan di Sekolah Menengah Pertama dan seterusnya Pak Menteri.

Nah ini karena, mohon maaf harus saya sampaikan, keluarga tidak punya pun itu akan berpikir bahwa untuk Sekolah Dasar adalah sebuah kewajiban tetapi ketika kemudian terbentur biaya, dia tidak akan berpikir untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah ketika Sekolah Menengah Pertama ini kemudian diperbesar sarannya, saya rasa ini menjadi sebuah salah satu solusi bagaimana untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia ya, dengan anggaran yang cukup besar ini.

Saya berharap ini menjadi apa namanya, saran untuk Kemendikbud itu satu, pertama eh kedua terkait dengan KIP kuliah. Tentu ini luar biasa program, tetapi Pak Menteri, akibat adanya program yang pernah

disampaikan oleh Kemendikbud beberapa waktu yang lalu terkait UKT. Saya di Dapil semua hampir ketika melakukan kunjungan beberapa ke perguruan-perguruan tinggi swasta yang notabenenya masih kecil, mereka sangat berharap. UKT ini betul-betul ditanyakan kembali setiap saya kunjungan. Mungkin teman-teman yang lain pun sama, mudah-mudahan ada penyisiran-penyisiran terkait dengan anggaran yang sudah kembali masuk 80 triliun ini untuk dialokasikan ke UKT tahun 2023.

Saya rasa itu Pimpinan dua hal, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Silakan masih ada anggota lainnya?

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) :

Ya terima kasih Pimpinan.

ANGGOTA KOMISI X DPR RI:

Eh izin.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) :

Mohon izin.

KETUA RAPAT:

Berbagi ya sedikit-sedikit ya nanti ya.

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) :

Saya bacain aja.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Yang terhormat Pak Menteri,
Bu Sekjen dan,
Seluruh anggota DPR RI yang terhormat Komisi X.

Ini dokumen ini yang disebar oleh Pak Menteri ada banyak yang kita sudah tanda-tandai tapi daripada lama nanti mungkin di konsinyering aja. Oh udah bunyi, oh iya iya, oh iya.

Jadi kita nanti bahas yang lebih detail nanti mungkin di konsinyering untuk tanya ini tanya itu setiap program yang disampaikan ini.

Tapi saya ingin bicara secara umum Pak Menteri, bahwa ya kita juga sadar bahwa 80 triliun tiap tahun dalam belasan tahun terakhir tidak *worth* untuk meningkatkan pendidikan Indonesia, kan gitu. Dan Pak Menteri termasuk dalam belasan tahun terakhir itu, gitu.

Yang kedua adalah bahwa tujuan negara ini ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dicerdaskan kehidupannya, kehidupan bangsanya yang dicerdaskan. Tetapi wacana dalam bidang pendidikan, dalam bidang kecerdasan itu ternyata sekarang ini malah tidak cerdas menurut saya atau ya tidak tidak menggambarkan kehidupan yang cerdas di dunia pendidikan di Indonesia. Ada banyak nih ada banyak sekali tapi saya bacain aja beberapa nih.

Wacana tentang *recruitment* guru PPPK, diskursus tentang itu, afirmasi honorer yang tidak cukup, penggajiannya dialihkan ke Pemda. Yang katanya PPPK 1 juta ternyata dibantah oleh Pak Menteri sendiri, gitu. Dua, aturan yang mengarahkan para dosen, yang mengarahkan fokus pada dosen itu hanya untuk persoalan-persoalan teknis, banyak waktunya habis di teknis ketimbang dia menghabiskan waktunya untuk belajar meningkatkan kualitasnya sebagai dosen.

Ketiga, pengkajian di internal Kementerian Pendidikan tentang pembentukan pemekaran LLDikti, kemudian dikaburkan oleh *recruitment* Kepala LLDikti itu sendiri. Ini judul-judulnya aja yang saya baca. Empat, saya baru baca Presiden nggak tahu ada ada ada RUU Sisdiknas, aduh. Lima, rekrutmen dosen yang tidak beres banyak yang tidak lulus dan ketidaklulusannya juga tidak relevan, 800 formasi dosen tidak terisi. Dan saya baca yang terakhir saja ini langsung, fungsi Kementerian Pendidikan lebih banyak sibuk sebagai pelaksana proyek atau program daripada menyerahkan dana proyek kepada daerah untuk dilaksanakan oleh dinas pendidikan.

Saya kira itu yang terakhir, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabaraktuh.

KETUA RAPAT:

Jadi pas sekali waktunya, terima kasih.

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman di Fraksi Partai Nasdem.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN) :

Saya saya Pimpinan, Bu.

KETUA RAPAT:

Oh iya Pak Prof.

F-GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN) :

Ya langsung saja Pimpinan, terima kasih.

Pimpinan dan seluruh anggota, maaf
Pak Menteri beserta jajaran.

Terima kasih telah memperjuangkan peningkatan anggaran, ini sangat kita apresiasi ya, mari kita berjuang terus karena mestinya seperti awal kita dulu 20% itu hendaknya 1 atap mengaturnya. Bagaimana PU bisa mengatur seluruh fisik diatur oleh PUPR, kenapa pendidikan tidak bisa, ini harus kita perjuangkan ke depan seperti itu.

Kemudian kita harapkan lakukan tujuan pendidikan kita tetap pada berlandaskan pada Undang-Undang Dasar ya, yaitu yang dikatakan tadi beriman, bertakwa, dan mencerdaskan bangsa dan seterusnya. Jangan jangan dari situ jangan jadi ahli, jangan jadi terampil, pulang-pulang jadi tukang pelajaran rumah kita nanti.

Nah kemudian hari senin yang lalu kami menerima lebih 200 Pimpinan perguruan tinggi di sini penuh *full*, atas *full* bawah *full* karena satu yang dibicarakan mereka tuh adanya perubahan peralihan dari BAN-PT ke LAM, ini sangat. Mereka minta LAM itu dibubarkan karena bisnis komersial, mahal, tidak mungkin ini, sekarang aja sudah megap-megap dengan bantuan pemerintah tidak ada pembiayaan untuk akreditasi, tapi itu yang sekarang sudah puluhan juta, mereka sudah insyaf tidak mau ada LAM, begitulah kerasnya dalam pembicaraan itu.

Dan kemudian izin program studi, sangat sulit keluar, ribuan program studi itu antri kata mereka, dan mau kapan menunggunya. Ya ini jadi perhatian bagi kita. Nah kemudian kita juga sebelumnya melihat kedatangan dosen-dosen yang sedang tugas belajar. Sewaktu mereka itu masuk ada edaran atau peraturan dibantu beasiswa, tapi begitu mereka lulus tes ini terima, beasiswanya dicabut. Ya ya angkatan 2018 dan ini ramai datang kemari dan kita baca di sini dan itu pun nggak di halau oleh Pak Putra, tidak ada anggaran untuk S3 ya untuk dosen S3. Nah ini nasib mereka bagaimana ini, mereka sudah *coleps*, untuk makan aja susah apalagi untuk membayar pendidikan dan sebagainya.

Nah perguruan tinggi swasta juga seperti kata teman-teman hendaknya dapat perhatian, ya kita PTN dapat perhatian bagus, ya PTS juga harus diperhatikan karena lebih banyak mahasiswanya di swasta daripada di negeri. Nah kalau kita lihat dari segi umur, anak umur 18 sampai 24 tahun itu ada 27 juta tapi yang masuk perguruan tinggi cuman 5 juta. Jadi artinya sisanya itu kita tidak mampu menampung mereka. Nah mestinya kita

besarkan agar PTS mampu menerima ya sebanyak-banyaknya anak-anak remaja ini sehingga mereka punya masa depan yang seperti kita harapkan.

Ini saja dari kami, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Tiga menit juga nih Pak akhirnya.

Terima kasih dari teman-teman Fraksi Gerindra.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Nasdem, silakan.

F-NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.):

Baik terima kasih banyak Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang kami hormati Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi X,
Dan juga Mas Menteri beserta seluruh jajaran.

Semoga selalu dalam kondisi sehat.

Saya langsung saja Mas Mentri, di halaman 5 dari gambaran sandingan Pagu ini memang kita bersyukur adanya peningkatan anggaran. Meskipun apa yang dipaparkan itu sebenarnya kita masih butuh lebih banyak anggaran daripada yang dicantumkan di sini. Dan dari daftar kekurangan Pagu itu yang bisa kami soroti kekurangan terbesar itu terletak pada anggaran untuk program kualitas pengajaran dan juga pembelajaran dan juga disusul oleh program pendidikan dan pelatihan vokasi. Namun juga memang di luar kekurangan pada program-program lainnya, menurut saya sebetulnya juga itu tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Jadi sebenarnya program lainpun juga sama-sama pentingnya.

Lalu juga yang kedua, saya rasa beberapa kegiatan yang merupakan juga terusan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya yang memang apabila setelah dievaluasi, program tersebut menghasilkan kinerja yang baik, maka sebenarnya tidak ada salahnya kalau program-program itu tersebut tetap diperjuangkan gitu untuk mendapatkan penambahan anggaran. Maka daripada itu nantinya juga penting agar kebutuhan anggaran itu juga disandingkan dengan hasil evaluasi ataupun kinerja kegiatan program tersebut serta argumentasi yang konkrit juga gitu.

Jadi mengapa perlu adanya penambahan kuantitas dari tahun sebelumnya. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan saya, Bang Putra, Bang Adzam juga, kayak sebenarnya sayang sekali Mas Menteri kalau misalkan kayak UKT, beasiswa unggulan, kalau itu tidak masuk dalam program-program kita lagi. Itu masyarakat yang terkena dampaknya karena betul sekali di Dapil itu setiap kita kunjungan ke kampus itulah yang ditanyakan. Apalagi mereka yang di tengah-tengah semester sebenarnya juga tetap membutuhkan bantuan-bantuan UKT, juga tentang beasiswa unggulan juga. Jadi sayang kalau ini tidak dilanjutkan lagi karena sebenarnya di lapangan sangat dibutuhkan sekali bantuan tersebut.

Lalu juga yang ketiga ini di halaman 10, salah satu penyumbang angka Pagu kekurangan yang terbesar itu kurang lebih sekitar 1 triliun itu ada di kegiatan GTK, GTK penggerak yang saya rasa sebenarnya dengan berevolusinya sistem pendidikan kita sebetulnya ini adalah hal yang sangat perlu sekali gitu ya. Maka daripada itu tentu tolong sekali kebutuhan anggaran tambahan ini kalau bisa terus dikejar. Dan juga untuk alokasi detailnya juga saya harap nantinya bisa diberikan porsi untuk satuan pendidikan dan juga GTK yang di ada di wilayah 3T juga.

Lalu mungkin yang terakhir dari saya adalah untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, juga ini yang kami soroti Pagu dan kebutuhan anggarannya khususnya untuk kegiatan *upskilling* maupun *reskilling*-nya. Yang dari paparan sepertinya Pagu yang diberikan hanya mencukupi 10%-nya saja dari kebutuhan, sedangkan memang. Sedangkan saya juga memahami betul gitu bahwa *upskilling* ataupun *reskilling* ini kan penting gitu ya di tengah baik perubahan di dunia pendidikan kita maupun di dunia usaha dan juga dunia industri itu sendiri. Jadi ya tolong di maksimalkan lagi saja sih Pak Menteri. Dan selebihnya terlalu banyak teknis, nanti mungkin pada saat konsinyering akan kita bahas lebih dalam.

Terima kasih banyak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Masih adakah dari.

F-NASDEM (RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc.) :

Ada kak eva.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (EVA STEVANY RATABA):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebelum Mba Eva, kita perpanjangan sambil kalau ada yang akan sholat keluar masuk gitu ya, gitu ya, setuju bergantian.

Mas Menteri gimana, nggak sholat, harus sholat. Musafir, masa musafir sini yang jawab gitu, Mas Menteri bener nggak, boleh nggak nih.

Jadi gimana nih, mau di-*break* atau lanjutkan? Tambah dulu 15 menit ya.

Baik silakan Mba Eva.

F-NASDEM (EVA STEVANY RATABA):

Baik Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi X beserta Bapak Ibu anggota,
Yang saya hormati Mas Menteri beserta para jajarannya.

Sedikit saja dari saya. Pada halaman 8 dan 10, terdapat usulan tambahan anggaran tahun 2023 dan penambahan target sasaran dan anggaran untuk program guru penggerak dan program sekolah penggerak. Di sini kami menyambut baik mengenai usulan ini, untuk itu kami berharap agar pemerintah pemerintah pusat dapat melakukan pendampingan, dapat melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sehingga pelaksanaan kebijakan dan program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan dapat menunjang serta meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Dan yang berikutnya, kami mendukung usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh Kemendikbudristek khususnya Ditjen GTK. Di mana guru dan tenaga kependidikan menjadi salah satu pilar utama dalam jalannya pendidikan di Indonesia ini. Oleh karena itu negara harus hadir di dalam mensejahterakan guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu penambahan kuota program GTK penggerak, pendidikan profesi guru prajabatan, dan rekrutmen guru ASN PPPK menjadi wajib hukumnya, agar guru dan tenaga kependidikan tenaga pendidikan yang telah berjuang, dapat menikmati hasil perjuangannya tersebut. Karena telah menjadi tanggung jawab negara untuk mensejahterakan guru dan tenaga pendidikan yang ada di Indonesia.

Dan kami berharap juga agar pemerintah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini, agar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat meningkatkan pendidikan di daerah.

Demikian Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Eva.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari Fraksi PKB.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat sore salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh anggota Komisi X,
Yang saya banggakan Mas Menteri, Bu Sekjen, Pak Hamid, dan beserta seluruh jajaran.

Saya hanya ya apa menambahkan alur yang disampaikan oleh teman-teman. Jadinya memang kita sama-sama telah ketemu dengan para pendiri perguruan tinggi PTS maupun juga pelaksananya, para Rektornya, aptisi, dan sebagainya. Jadinya dari data BPS, bahwa jumlah mahasiswa tahun 2021 itu ada di angka 8,9 juta dan itu ada kenaikan di angka 4,1%. Dari 8,9 juta itu mereka tersebar di 3.115 kampus perguruan tinggi yang secara data, kampus PTS itu sekitar 2.990 dan PTN 125.

Dan saya lihat dari pemaparan tadi bahwa dalam data memang banyak sekali anggaran yang langsung dialokasikan untuk BOPTN untuk pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri. Nah dengan adanya KIP dan juga harapannya dari pemilik yayasan Perguruan Tinggi dan juga teman-teman dari pengurus Perguruan Tinggi mereka berharap program UKT juga ada. Jadi ini menjadi angin segar bagi mereka untuk bisa bertahan dan bisa kembali bangkit, karena memang dengan Pandemi Covid ini banyak kampus-kampus yang kekurangan mahasiswa dan ada mahasiswa pun mereka rata-rata menunggak dalam pembayarannya.

Mudah-mudahan dengan adanya program KIP dan juga UKT ini bisa membantu para pemilik dari Perguruan Tinggi Swasta dan juga penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta untuk bisa menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian juga dalam DAK TIK juga perlu Mas Menteri untuk selalu bisa mendorong program ini bisa tepat sasaran. Karena memang kita ketahui bahwa dari sekian ribu sekolah yang ada di Indonesia, yang baru punya TIK kalau nggak salah data terakhir itu baru 22%. Artinya masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum punya TIK.

Kita berharap teknologi ini bisa men-*support* seluruh calon pemegang estafet perjuangan bangsa ke depan, jangan sampai generasi kita ke depan generasi yang gagap teknologi. Karena kita ketahui bahwa sekarang teknologi perkembangannya begitu cepat. Tadi disampaikan beberapa program *platform digital* yang dibangun oleh Kemendikbud, saya berharap bisa dirasakan sampai ke wilayah 3T gitu. Jadinya Mas Menteri nanti mohon didorong berkenaan dengan jaringan, kemudian juga berkenaan dengan teknologinya TIK-nya bisa tersebar kepada seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita harus jaga juga aturan dari Kemenperin.

Izin Pimpinan saya ambil sedikit aja punya Pak Ketua.

Jadinya berkenaan dengan TKDN-nya dan juga berkenaan dengan BMUN-nya. Jadinya perlu dikaji, emang bener-bener pabriknya ada di Indonesia kah, pekerjaannya orang Indonesia kah, produk-produknya sekian persen secara aturan itu produksi dalam negeri. Jadi jangan sampai produksi dalam negeri itu hanya kardus dan tas laptopnya aja. Nah ini juga harus dicek kepastiannya.

Kemudian yang terakhir ini yang sangat penting juga ini. Saya membantu Bu Sekjen sebenarnya ini, karena bicara kampung halaman jadinya, guru-guru PPPK saya sudah bicara juga dengan Mas Iwan, yang ditanggapi sangat cepat. Jadinya guru PPPK ini setelah mereka diangkat maupun juga kemarin honorer, mereka kan orang tuanya itu adalah Kemendikbud ya kan dan mereka diperbantukan untuk mendidik anak bangsa yang ada di Lampung, di daerah-daerah dan sebagainya.

Dan tentunya setelah, ini kita jangan bicara yang mereka belum lulus, ini yang lulus aja belum dapat hak dan apa hak-hak yang harusnya diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan nanti Mas Iwan tolong ditanyakan dengan Dinas Pendidikannya tolong di suratkan. Jadi jangan sampai Pemerintah Pusat udah melakukan suatu terobosan untuk bisa memberikan harapan dan mendorong peningkatan mutu kualitas pendidikan, ternyata Pemerintah Daerah nggak punya semangat yang sama. Nah ini harus kita tegur kita cari permasalahannya di mana, kita cari solusinya. Mudah-mudahan para pahlawan pendidikan Indonesia mendapatkan hak dan apa yang harus kita berikan kepada mereka.

Mungkin itu Mas Iwan dan juga Mas Menteri. Saya bantu Bu Sekjen yang terakhir tadi karena ini kalau pulang kampung, saya pulang, Bu Sekjen pasti lebih berat lagi kalau pulang kampung ya.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari PKB masih ada Mas?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Baik.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Pimpinan Bu Agustin,
Kang Dede dan Pak Fikri,
Pak Menteri Sesmen dan segenap jajaran.

Jadi apresiasi tentang arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023, tapi saya pikir apa yang kita sampaikan ini *highlight* saja Pak Menteri, Bu, karena kita akan elaborasi nanti dalam rapat-rapat berikutnya.

Saya tertarik sekali tentang strategi kebijakan tentang kemajuan pelestarian dan bahasa dan kebudayaan. Ada tiga perempat *pointers* di situ. Kebetulan di sini ada apa Pak Doktor Hilmar Farid, Pak Dirjen, partisipasi publik dan dalam BIPA kemudian kegiatan kebudayaan, perlindungan dan pengembangan budaya, diplomasi budaya.

Kami baru saja kembali dari Dapil reses kemarin, terakhir, kami ditanyakan tentang hal pemajuan kebudayaan ini. Beredar di sana juknis, Pak Dirjen, Pak Menteri, tentang peraturan Direktur Jenderal kebudayaan Nomor 1/2022, petunjuk teknis bantuan pemerintah fasilitas bidang kebudayaan tahun 2022. Ditanyakan pada kami tentang hal ini karena banyak ingin berminat mengajukan, kita bilang itu adalah apa namanya ada di Kemendikbud pusat, karena di sana disebutkan Ibu Pimpinan, satu bagian ke bantuan itu 500 miliar/500 juta, kegiatan dokumentasi karya dan pengetahuan maestro.

Yang kedua adalah tentang 500 juta untuk satu kegiatan pembudayaan ruang publik, pendayagunaan ruang publik. Nah tentu saja nanti kita ingin pertajam ini, selanjutnya karena banyak hal-hal pengajuan hal yang sama misalnya tentang museum itu, tentang kemudian pernah kita usulkan tahun kemarin, adanya renovasi dari situs penyebar Islam pertama di Sulawesi Selatan itu. Sudah sejak dua kali diajukan bahkan sejak periode sebelum kami di sini, periode sebelumnya tentang Datuk Tiro di Bulukumba. Nah itu juga proposalnya dari Bupati, selalu ada itu Bu, satu itu saja.

Nah ini sebagaimana disampaikan oleh apa sebelumnya, beban bagi kami sebetulnya yang kayak-kayak begini ini. Walaupun misalnya, bagaimana usulan saya misalnya 500 itu kenapa tidak dipecah, misalnya menjadi 100 atau 200, biar bisa banyak apa namanya alokasi bisa mendapatkan keuntungan mendapatkan *empowering* dari sebuah kegiatan. Karenanya usulan konkrit kami Pak Menteri, lewat Pak Hilmar, oleh Pak Menteri, hal yang seperti ini mungkin perlu kami usulkan lebih jauh nantinya. Bagaimana supaya bisa apa yang kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023 nanti menjadi tepat sasaran tepat guna dan bisa dirasakan oleh masyarakat, tidak saja di Jawa tapi juga di luar Jawa.

Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Andi.

Dari PKB masih ada Pak Bisri tapi jangan lama-lama ya.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Wakil Pimpinan,
Teman-teman Komisi X,
Pak Menteri dan jajarannya yang kami hormati.

Saya sedikit aja Bu, menggarisbawahi Pak Ali Zamroni yang kemungkinan kalau Pak Ali Zamroni itu minta ditambahin yang Sekolah Menengah. Kalau kami yang minta ditambah Sekolah Menengah Atas. Contoh di Kabupaten Pekalongan aja, SMK itu hampir 25.000, nah kalau SD di daerah-daerah tertentu itu banyak difasilitasi oleh Pemda. Mohon untuk bisa SMK diperbanyak.

Yang kedua, ini saya baca halaman 11 ada kemitraan satuan pendidikan dengan DUDI. Ini seleksinya kayak apa, mungkinkah anggota DPR bisa merekomendasikan hal tersebut.

Yang terakhir, ketika kami pulang ke Dapil itu banyak sekali keluhan dari sekolah soal fasilitas informasi teknologi. Nah dalam rangka tersebut, program Merdeka Mengajar dan kurikulum Merdeka mohon Kemenristekdikbud punya strategi percepatan supaya kurikulum Merdeka itu bisa berjalan dengan lancar.

Mungkin itu aja.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bisri.

Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat.

Silakan Pak Dede.

F-PD (Dr. DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I.Pol./WAKIL KETUA KOMISI X):

Terima kasih Bu Ketua. Saya mau mencoba mengambil jatahnya Pak Bram dan Bu Anita juga mungkin.

Mas Menteri yang saya hormati,
Ibu Sekjen dan seluruh jajaran,
Pak Ibu Pimpinan.

Memang agak sulit ini mencoba untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dalam waktu 3 menit. Saya mencoba, kalau kata orang milenial zaman sekarang kita harus secepatnya kita main cepat. Ada *pending matters*, *you have a pending matters* yang belum selesai, terutama, maaf, saya nggak tahu ini di Dirjen yang mana.

Pertama, dari 12.000 PLPG tahun 2016, masih ada 5.000 yang nggak lulus karena kebijakan berubah menjadi PPG. 5.000 yang tidak lulus ini jelas sudah diberi kesempatan 4 kali, betul, tapi mereka nggak lolos, tapi kelolosannya lebih banyak dihitung oleh *multiple choice*. *Which is*, apakah nilai kompetensi kita hidup kita dihitung hanya berdasarkan *multiple choice* atau ada portofolio? Sementara dosen bisa naik tanpa ada *multiple choice*, cukup dengan portofolio, *that's the pending matters* masih 5.000 orang. Mungkin Mas Menteri belum tahu, saya sampaikan.

Kedua, Mas Menteri yang saya hormati. Permasalahan BAN-PT menjadi LAM-PT ini juga masalah. Kami sudah menerima APTISI yang sudah teriak-teriak karena masalah soal angka yang begitu besar, saya pikir ada di Dikti ini saya juga kurang paham. Saya nggak mau perpanjang, tapi pasti Mas Menteri tahu.

Yang ketiga Mas Menteri, ini ramai, lagi ramai isu soal biaya Fakultas Kedokteran yang mahal. Padahal pada saat Covid *we needs the doctor*, kita butuh Dokter begitu banyak tapi ternyata kita tahu angka Fakultas Kedokteran itu yang mencapai angka yang tertinggi. Bahkan ya saya tidak perlu sebutkan angkanya tetapi mungkin dari berbagai fakultas ini termasuk tertinggi. Bisakah kita punya kebijakan yang angkanya tidak setinggi yang sekarang. Sehingga distribusi Dokter bisa merata, Sulawesi, Kalimantan, dan sekarang kebanyakan ngumpul di pulau Jawa.

Berikutnya saya mohon, saya pikir sudah disampaikan yang lain. Yang sudah lolos PPG agar segera dikeluarkan SK dan penempatan formasi.

Yang terakhir nih Pak Wilmar tapi Pak Wilmar keluar. Museum, kita punya Museum Nasional yang mungkin saat ini ada mungkin ada 7, kalau saya tidak salah ini dibiayai oleh Kemendikbud, *but* masih ada 300 lebih Museum Swasta lainnya, oke nggak ada masalah apabila itu dibiayai oleh mereka. Tapi bolehkah Kemendikbud mengeluarkan satu aturan yang mendorong agar Pemda memberikan *support* kepada Museum-Museum yang ada di daerahnya, kenapa? Jangan sampai kasus Reog Ponorogo kalau nggak salah kemarin ya yang ramai katanya mau di ambil Malaysia. Itu karena kita nggak buru-buru melakukan *copyright* dan salah satu bentuk *copyright* (hak cipta) atau pembukuan dan sebagainya itu adalah Museum. Jadi hanya masalah peraturan saja.

Itu saja, mudah-mudahan itu bisa menjelaskan dan saya yakin belum 3 menit, terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Karena masih panjang, nambah lagi boleh? Nggak, nggak cukup cukup cukup. Saya pikir sudah cukup waktunya, ini kita sholat maghrib dulu ya.

KETUA RAPAT:

Gimana Mas, kita skors dulu aja untuk ini atau, ya skors dulu ya 10 menit gitu, tapi Mas Nadiem jam 7 mau ada acara ya sebenarnya ya.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Silakan Bu saya kembalikan ke Pimpinan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP./WAKIL KETUA KOMISI X):

Ya sekarang teman-teman sekarang gimana kalau kita skors sholat 10 menit gitu ya. Ya kan belum sholat, kita skors dulu ya teman-teman 10 menit aja sampai dengan 18.30 gitu supaya yang mau sholat tenang terus kemudian nanti.

Ya baik diskors selama 10 menit.

(RAPAT:DISKORS)

(KETUK PALU 1 KALI)

(SKORS DICABUT PUKUL 18.43 WIB)

Teman-teman.

Baiklah Bapak Ibu akhirnya kita skors juga tadi, setelah Fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kita teruskan memberi kesempatan kepada Fraksi PKS.

Ibu Ledia silakan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi X,
Mas Menteri beserta seluruh jajaran.

Terima kasih atas kesempatannya. Ada beberapa hal, tidak mesti harus dijawab tapi saya pikir nanti dijawabnya ketika konsinyering itu bisa dilakukan.

Pertama, di halaman 3. Saya ingin menanyakan tentang, sebenarnya desain riset Perguruan Tinggi kita seperti apa karena ada amanat Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa "riset di Perguruan Tinggi itu adalah riset yang harus di, riset dasar dan inovasi dasar yang harus dikembangkan".

Sementara kita lihat bahwa anggaran riset adanya hanya BOPTN riset dan juga dan yang termasuk di dalamnya *matching fund*, ada juga *competitive* apa ya *competitive fund*, yang kita juga lihat bahwa ini kan berlaku bagi seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Kalau kita minta swasta untuk bertanding, sementara titik nolnya tidak sama, apalagi harus bersaing dengan PTNBH pasti itu akan rumit. Karenanya kami perlu tahu sebetulnya bagaimana, bukan berarti swasta tuh tidak mampu tapi karena tadi peluang dan kesempatan itu menyulitkan.

Kedua, masih dari halaman 3. Kami memerlukan informasi tentang mana kegiatan kebudayaan yang didanai oleh APBN murni dan mana yang didanai oleh dana abadi kebudayaan. Karenanya supaya kita bisa tahu sebenarnya ini di pergunakan kok, tadi Mas Kang Dede bilang soal Museum, jangan-jangan didanai oleh dana abadi kebudayaan tapi kita nggak tahu gitu.

Nah ini jadi bagian yang sangat penting untuk disampaikan agar kemudian bisa dipahami.

Ketiga, kita selalu membicarakan tentang KIP, bukan PIP ya, KIP. KIP yang harusnya diterima oleh yang SD/SMP/SMA/SMK itu sering kali nggak keluar uangnya dan nggak bisa di-komplain karena itu dananya dari dana, maaf bukan dana, sumber datanya dari DTKS, sehingga Kementerian di Dinas Pendidikan pun di kota/kabupaten maupun provinsi tidak bisa melakukan apa-apa. *Problem*-nya ketika kita mau membantu supaya mereka dapat PIP, nggak bisa karena terkunci dalam sistem, kita nggak bisa klik sama sekali itu. Nah akhirnya orang yang harusnya dapat bantuan, jadi nggak dapat bantuan sama sekali karena sistem, sistem yang tidak mencairkan uangnya, sistem pula yang mengunci untuk bisa mendapatkan bantuan. Jadi ini perlu dicermati lebih dalam.

Kemudian di halaman 7, masih bicara tentang sistem. Ada penguatan *platform digital* dan lain sebagainya. Saya sedang agak *iffill* kalau nggak disebut kecewa sama sistem yang ada di Kemendikbudristek. Karena di sistem di Perguruan Tinggi di Dirjen Dikti, ini sudah sudahlah beda-beda sistemnya, udah gitu nggak ada jembatannya sehingga menyulitkan dan itu menimbulkan *problem*.

Yang terakhir adalah Silemkerma berubah menjadi siaga misalnya, di perguruan tinggi untuk melakukan pendaftaran. Belum lagi bicara tentang riset, dulu ada Sinta, ada siapa, jangan-jangan Shinta Rahwana dan lain sebagainya gitu ya, itu menjadi hal yang menurut saya masih harus diselesaikan.

Perasaan belum 3 menit. Kemudian kalau kita. Ya mengambil jatah Pak Mustafa Kamal katanya.

Kemudian yang di halaman 9, halaman 9 poin ke 10, satuan pendidikan yang melaksanakan *assessment* di BSKAP. Ukurannya adalah 285.663 lembaga per 18.005 model. Biasanya kalau kita bicara tentang Pak satuan, satuan bagi anggaran gitu, tentu akan lebih jelas ini sebenarnya mau lembaga atau model, mau yang mana dan bagaimana satuannya. Karena penghitungannya pasti tentu berbeda dan itu ada desain yang berbeda. Jika kemudian kita tidak melihat itu sebagai satu desain yang yang tepat tentu harus kita pertimbangkan, masih perlu nggak dan apabila masih minta tambahan anggaran 14,22 Miliar.

Kemudian juga sama, tentang organisasi penggerak satuannya adalah orang. Padahal organisasi, jadi sebenarnya maksudnya apa di halaman 10 itu di poin ke 20.

Kemudian berkaitan dengan lembaga kursus pelatihan yang dikembangkan. 2023 ada 100 lembaga targetnya yang akan dikembangkan, tiba-tiba minta anggaran tambahan 1.100. Kok jadi sangat besar, berarti nggak terdesain dong dari atau baru kepikir. Oh iya ada yang nggak kebawa, tempatnya Bang Andi belum, tempatnya Prof Djohar belum, tempatnya Bang

Ali Zamroni belum, tempatnya Pak Sidot belum, lah akhirnya terus kemudian di itung-itung ternyata eh kurangnya banyak ya. Ya udah masukin aja gitu, kan nggak lucu.

Padahal tadi disebutkan oleh Pak Purnamasidi bahwa sebenarnya ada anggaran besar. Berarti Babnya adalah ketika anggaran bertambah kita tidak serta-merta bersyukur karena tambah anggaran yang harus ada jelas desainnya. Nanti pergi ke mana itu anggaran, kan gitu, jadi satu hal yang sangat penting menurut saya.

Kemudian ketika kita bicara tentang tadi Perguruan Tinggi, perguruan Tinggi Swasta, masih hal yang disampaikan juga oleh aptisi termasuk di dalamnya adalah bagaimana kemudian kita memiliki desain kalau kita pingin punya SDM yang baik berkualitas, SDM Pendidikan Tingginya begini Pendidikan Tinggi Swastanya, terus kemudian Pendidikan Tinggi negerinya begini. Karena ketika bicara soal PTN BH mereka punya standar dan pembiayaan yang sangat besar, sementara yang swasta itu jauh sekali, nggak akan bisa mengejar. Sementara kita menginginkan bukan cuma kita punya *world class* University yang cuma hitungannya dalam jari 12345, tapi kita menginginkan rata semua, keadilan sosial itu tercermin dalam pemerataan itu. Jadi ini bagian yang sangat penting menurut saya.

Kemudian saya berulang-ulang belum menemukan juga ada hal. Tadi Bu Sekjen mengatakan bahwa memerlukan adanya buku penyediaan buku bacaan pendukung. Buku bacaan pendukung itu sekalian saja berdasarkan standar jumlah kosakata dalam bacaan wajib dan penunjang pada level pendidikan tertentu, sehingga tercipta literasinya. Saya nggak akan berhenti-berhenti ini sampai keluaran, di Perpustakaan Nasional saya mengatakan hal yang sama ke Kementerian Pendidikan juga saya mengatakan hal yang sama. Supaya ini kemudian kita bisa meningkatkan literasi, kemampuan literasinya sudah sekaligus, usia sekian bisa berapa kosakata, usia sekian berapa kosakata. Jadi sekali terintegrasi jumlah penyediaan buku sudah sekaligus dengan apa yang sebetulnya kita kejar dari target mereka.

Rasa-rasanya sih itu saja karena khawatir nanti lebih panjang lagi. Kemudian giliran berikutnya akan diserahkan pada Pak Fahmi. Tentu nanti di konsinyering kita akan lebih dalam lagi.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ledia.

Saya yakin ini rusak, belum 3 menit kan, besok saya beli yang baru tapi sementara pakai ini lagi ya.

Silakan Pak Fahmi.

F-PKS (Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., Med.):

Saya pikir PKS sudah cukup disampaikan oleh Bu Ledia, saya khawatir menyita waktu lebih banyak, makasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah, PKS cukup.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Tambah sedikit deh kalau gitu.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,
Pimpinan dan Anggota Dewan.

Saya hanya menyampaikan tentang guru PPPK yang kemarin datang di Dapil saya berbondong-bondong begitu, mereka di-test yang pertama *Alhamdulillah* sudah diangkat, tapi diangkat 6 bulan setelah dinyatakan lulus dan kemudian terkejut melihat SK-nya hanya 1 tahun. Jadi akhirnya yang 6 bulan itu mereka tidak dapat gajinya, gaji nanti yang 6 bulan yang akan datang, itupun ya hanya 1 tahun dan tahun depan tidak jelas.

Jadi memang nasib guru kita ini Pak Menteri, saya kira masih jauh dari kemegahan infrastruktur yang sedang dibangun sekarang ini. Ya sudahlah yang pensiun yang meninggal, ASN guru tidak otomatis digantikan dengan guru, padahal jumlah murid di Indonesia bertambah. Lalu kemudian diganti dengan P3 PPPK, dari 1.500.000 yang ditest dari 500 ribu mungkin bari setengahnya yang dinyatakan lulus. Yang dinyatakan lulus diangkat 6 bulan kemudian, yang digaji kemudian tinggal 6 bulan karena cuma 1 tahun masa kerjanya.

Jadi saya kira ini sesuatu yang anti klimaks dari berita tentang pengangkatan guru PPPK ini. Mohon saya usulkan ada semacam unit pengaduan ya, untuk pelayanan terhadap proses-proses yang di lapangan ini menimbulkan kesimpangsiuran diantara guru-guru. Ada pelayanan publik online-lah untuk konsultasi, apalagi kalau sudah teregistrasi nomornya dia bisa satu persatu dijawab gitu. Saya kira 24 jam itu juga baiklah, setidaknya tidaknya guru-guru kita mendapatkan kejelasan tentang proses dan dan

nasibnya. Anggarannya kalau memang bisa diselipkan pada anggaran yang sedang kita susun sekarang ini untuk pelayanan online 24 jam kepada guru-guru kita yang sedang berproses untuk mendapatkan status yang lebih jelas.

Terima kasih Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih Pak Mustafa.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada teman-teman dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Ibu saudaraku silakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.) :

Terima kasih saudaraku Agustin.

Dan hari ini saya memakai baju pemberian saudaraku. Kalau Pak Menteri saudaraku belum tinggal menyampaikan.

*Bismillahirrahmanirahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa karena ini kita adalah Kementerian Pendidikan, berarti bahwa tingkatan sarjana juga perlu diperhitungkan dengan baik. Di Indonesia ini rasio lulusan S2, S3 masih sangat sedikit, bandingkan sajarah dengan Malaysia, kalau Indonesia itu 143 Doktor per 1 juta penduduk, Malaysia itu 509 per 1 juta penduduk, Amerika 9.850 per satu juta penduduk.

Intinya adalah kami sangat menginginkan bahwa beasiswa unggulan ini harus tetap ada saudaraku Menteri, karena ini adalah pintu keluarnya jalan keluarnya dari kami, dari ananda semua itu yang sangat ingin bisa masuk S2 S3 untuk bisa melanjutkan kuliah mereka. Karena kalau beasiswa LPDP mereka sulit sekali tembus karena terlalu ruwetisasi. Nah jadi beasiswa unggulan betul-betul menjadi jawaban dari kami terutama di daerah-daerah untuk bisa melanjutkan S2 dan S3.

Yang kedua, alih-alih melihat adanya alokasi beasiswa unggulan. Saya justru melihat adanya terminologi baru, yaitu Beasiswa Presiden halaman 4. Nah Beasiswa Presiden ini menargetkan 2.760 orang dengan biayanya 358,69 miliar. Ini apakah seperti yang dulu lagi, pada tahun 2014 kan ini diluncurkan Beasiswa Presiden dan ini hanya boleh menembus 50 Universitas terbaik di negeri luar, di luar negeri, top 50 Universitas Dunia.

Nah saya ingin menyampaikan, kalau kita bandingkan ya saudaraku. Beasiswa di tahun 2022 nih angkanya, beasiswa unggulan ADIK. ADEM dan Dosen itu dapat menyentuh 17.140 mahasiswa dengan 663,28 miliar, sementara di RKA tahun 2023 ini di halaman 4 saudaraku, Beasiswa Presiden itu hanya dapat menyentuh 2.760 dengan anggarannya 358,69 miliar, jadi rasionya sangat jauh sekali. Jadi kalau kita boleh tanyakan, apa sih nih istimewanya Beasiswa Presiden.

Dan selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam paparan yang disampaikan ini, belum bisa melihat program bantuan pemerintah biro keuangan. Di mana bantuan ini sangat perlu, Bu Ketua kan perlu bantuan kan, nah ini saya bicarakan ya.

Nah segini ya, aduh ini bantuannya mana ya, oke yang ini.

Oke karena bantuan tambahan waktu karena di tahun-tahun sebelumnya bantuan ini ada dan ini menjadi bantuan pemerintah yang sangat membantu sekali, terutama untuk sekolah-sekolah kecil yang membutuhkan perbaikan toilet, pembuatan pagar, rehabilitasi ringan, dan sebagainya. Nah ditambah lagi kan sekarang kita tidak bisa melakukan perbaikan RKB, renovasi sekolah, apalagi membuat unit sekolah baru, semuanya sudah berada di PUPR. Jadi bantuan ini sangat amat sangat dibutuhkan supaya sekolah kita paling tidak kami ini atau kita semua dan pemerintah bisa membantu untuk hal-hal yang ringan.

Dan yang terakhir, saya sangat mendukung peningkatan nilai anggaran dalam program PKW PKK yang dijabarkan dalam halaman 11. Karena ini memang sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang tidak beruntung untuk bisa melanjutkan sekolah padahal keterampilan ini sangat dibutuhkan, terima kasih.

Oh ya terakhir dari yang terakhir, Pandemi Covid memang sudah berlalu tapi dampaknya kepada orang tua mahasiswa belum berlalu, malah nggak tahu kapan berlalu. Karena itu jawaban UKT sangat dibutuhkan untuk para mahasiswa yang mana.

Banyak pendukung saya. Yang mana sangat dibutuhkan, jadi UKT sangat diperlukan, *please* tolong dibantu untuk ada diadakan, terima kasih saudaraku Menteri dengan seluruh jajarannya.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya kembalikan Ketua tetapi anggota saya mau bicara dulu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

Terima kasih Bu Dekor, selanjutnya silakan Prof, silakan Prof.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Ibu Agustina Wilujeng Pimpinan Rapat Kerja dengan, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Teman-teman Anggota Komisi X yang saya hormati dan, Seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Ristek yang hadir pada sore hingga malam hari ini.

Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Kapoksi saya terutama terkait dengan rekrutmen guru ASN PPPK, ini Pak Dirjen ini. Di tahun ini pagu indikatif tidak mengalami penambahan Pak ya tetap 53,7M di 34 Provinsi dan kemudian mengajukan usulan tambahan 75,51M. Sebetulnya kalau ingin rinci nanti pada saat konsinyering Pak, tapi poin yang ingin saya sampaikan ialah guru-guru honorer kita ini adalah. Menurut saya adalah beban dan bisa menjadi beban politik gitu, mengapa? Karena kita ini negara yang sudah masuk G20, negara yang ekonominya cukup besar, pertumbuhan yang cukup bagus, kalau kemudian mengalami apa namanya persoalan ekonomi kita akan berpengaruh kepada ekonomi di negara-negara lain. Tetapi ironisnya kita masih punya karyawan atau pegawai yang gajinya sangat tidak manusiawi, siapa mereka, yaitu tenaga-tenaga honorer.

Oleh karena itu menurut hemat saya, bukan persoalan kita ini nggak punya uang menurut saya. Tetapi perencanaannya yang menurut hemat saya kurang bagus. Jadi penetapan skala prioritas tidak kepada pembenahan SDM. Kita bisa membangun infrastruktur, kita bisa menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan infrastruktur biayanya juga besar, tetapi beberapa diantaranya belum prioritas. Ini menurut saya prioritas dan kesempatan ini kita sebetulnya bisa memprioritaskan untuk memperhatikan guru honorer. Kalau bisa penambahan anggaran ini bisa menyelesaikan rencana Mas Menteri tempo hari yang sudah terlanjur ngomong, 2021 akan kita angkat 1 juta guru honorer menjadi ASN.

Saya kira ini ini ini menurut saya perlu diprioritaskan supaya kita tidak menjadi beban politik. Kami sendiri di Dapil hampir tiap saat itu saya harus mendengarkan aspirasi mereka dan monitornya melalui melalui WA itu berkelanjutan. Ada yang menyampaikan pada saya masalahnya sampai 15 poin Pak, 15 poin kepada kita itu. Jadi poinnya menurut hemat saya, ini perlu kita selesaikan kita alokasikan anggaran.

Kemudian yang kedua Mas Menteri, kalau bisa rekrutmennya itu jangan hanya mendasarkan kepada *multiple choice* atau skor test. Saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan Mas Menteri pada awal dulu, kita berada di dalam situasi di mana gelar bukan segala-galanya, kelulusan belum tentu bisa berkarya. Lulus PPG atau lulus apa namanya test *assessment* apa namanya test PPPK yang dengan test test objektif, itu juga

belum menjamin dia bisa mengajar. Tidak lulus bukan berarti tidak bisa mengajar.

Oleh karena itu, saya sepakat sebenarnya yang kita lihat kompetensinya. Terutama mereka yang usianya sudah cukup lanjut dan punya pengalaman mengajar yang cukup banyak. Nah ini kita beri afirmasi, kita beri afirmasi, kalau perlu alokasi anggaran tidak ada dan kita usahakan supaya ada, bisa kita angkat Pak, 1 juta guru honorer menjadi ASN yang kemarin sudah tahap 1 tahap 2, sudah kita mulai. Nanti tahun ini kalau bisa 1 juta bisa kita angkat Pak Menteri, ini satu.

Kemudian yang kedua, peningkatan guru profesionalisme guru, ini juga Pak Dirjen GTK. Kami berpesan, guru kita ini sudah sangat lama didominasi oleh sebuah paradigma yang disebut paradigma behavioristik, paradigm behavioristik adalah paradigma di mana seseorang, perilaku seseorang itu adalah hasil intervensi orang lain. Jadi kalau anak kita belajar karena di perintah guru, itulah sebabnya ketika kemudian ada Covid guru tidak bisa intervensi tidak terjadi proses pembelajaran. Akibatnya apa, *learning loss* gitu kan.

Oleh karena itu, kalau kita ingin meningkatkan kompetensi guru, alihkan transformasikan dari behaviorisme ke konstruktivisme. Di mana kemudian kita bisa memberikan atau guru-guru kita bisa mendesain pembelajaran, di mana anak-anak didik kita bisa mandiri, bisa berinisiatif, saya kira itu orientasinya, ini yang penting.

Dan saya kira itu saja dari dari saya, untuk dalam kesempatan yang berbahagia ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Terima kasih dari teman-teman Fraksi PAN, selanjutnya.

F-PAN (MITRA FAKHRUDDIN MB, SP.):

Tambahan 1 lagi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gimana Pak?

F-PAN (MITRA FAKHRUDDIN MB, SP.):

Mitra Bu.

KETUA RAPAT:

Ah mitra dari Teh Desy loh.

F-PAN (MITRA FAKHRUDDIN MB, SP.):

Siap, boleh dilanjutkan Bu.

KETUA RAPAT:

Ya kan, marahin Teh Desy, izin dulu sama Teh Desy, boleh, silakan.

F-PAN (MITRA FAKHRUDDIN MB, SP.):

Izin.

Baik, terima kasih.

Pimpinan,
Teman-teman anggota Komisi X yang saya hormati,
Mas Menteri bersama dengan seluruh jajaran.

Saya hanya 3 poin Mas Menteri. Tadi sudah disinggung juga terkait dengan mahalnya biaya kedokteran ini. Tentu ini juga akan apa namanya, menggambarkan kualitas Dokter-Dokter kita ke depan. Artinya yang hanya bisa jadi Dokter itu orang-orang yang kaya saja, yang mampu membayar biaya-biaya masuk ke fakultas kedokteran yang begitu mahal Mas Menteri.

Kemudian yang kedua, sistem penginputan pada program PIP kali ini. Saya kemarin muter-muter di Dapil, teman-teman tim kita yang selama ini membantu dalam proses penginputan memang sangat kewalahan, karena begitu sulitnya sistem yang ada di sistem Dapodik sekarang ini Mas Menteri. Tentu ini berkaitan juga dengan KIP, terima kasih Mas Menteri ini sangat luar biasa pemerintah telah hadir dalam rangka memberikan *support* kepada keluarga-keluarga kita yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat Universitas, *Alhamdulillah* KIP hadir dan membantu. Dan kita ketahui Covid kemarin sangat luar biasa apa namanya, menjadi cobaan bagi keluarga-keluarga kita yang kurang mampu.

Terus yang terakhir terkait dengan kualitas pendidikan kita Mas, mohon maaf Mas Menteri, saya kira kita belum mempunyai terobosan selama hampir 2 tahun lebih berjalan Covid ini. Sistem pendidikan kita ataupun kualitas pendidikan kita ini masih kurang terobosan keluar dari terpaan Covid itu kemarin. Maksud saya, guru-guru kita untuk kalau kondisi Dapil saya Mas Menteri, guru-guru kita di Dapil saya itu rata-rata masih S1. Tentu kualitas pendidikan kita sangat menurun di masa Covid kemarin itu dan kita berharap untuk memperbaiki itu kita butuh guru yang punya kualitas jauh lebih baik lagi ke depan.

Nah maksud saya, program BU hadir kalau bisa ini bisa lebih ditingkatkan lagi ke depan. Beasiswa Unggulan ini membantu guru-guru kita melanjutkan pendidikannya ke tingkat S2 ataupun ke tingkat S3, sehingga transfer ilmu itu bisa jauh kualitasnya jauh lebih baik lagi terpadu.

Mungkin itu saja Mas Menteri, terima kasih terima kasih, waktunya juga sudah habis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Iya ini rusak kok, nanti aku beli lagi yang baru.

Selanjutnya, mungkin kami berikan kesempatan kepada dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Silakan Ibu Illiza.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Saya ambil, nanti saya juga ambil jatahnya Gus Rojih.

KETUA RAPAT:

Rusak ini jelek.

F-PPP (Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL,S.E.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur pada Allah dan sholawat pada Rasulullah.

Pimpinan dan seluruh anggota Komisi X,
Mas Menteri,
Bu Sesmen dan seluruh jajaran.

Yang pertama, kami mengucapkan, "Selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin". *Taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bikhair, insya Allah*, karena ini pertama kali saya ketemu.

Dan kemudian dari 2 mitra kerja kita yang pertama, dua-duanya anggarannya turun Mas Menteri. Dan ini *Alhamdulillah* untuk Kemendikbudristek ini ada kenaikan anggaran. Nah kemudian memang yang kami ingin sampaikan ketika kita berbicara dengan arah kebijakan, maka evaluasi terhadap kebijakan yang telah lalu pada arah kebijakan RKP 2023

bidang pendidikan harusnya melalui evaluasi ketepatan sasaran RKP 2022 yang saat ini. Sehingga akan didapatkan hasil evaluasi RKP 2022 untuk menjadi sandaran di 2023.

Nah pada RKP 2022 yakni meningkatkan kualitas SDM dan inovasi pekerja bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%, tingkat penyelesaian pendidikan SMA sederajat 70,60%, angka partisipasi kasar Pendidikan Tinggi 35,62%, 400 produk inovasi dari perusahaan pemula berbasis teknologi, 900 paten domestik, dan kami berharap sasaran kebijakan RKP bidang pendidikan 2023 itu dapat melihat dan melalui evaluasi atas RKP 2022.

Nah karena itu, sesuai arahan prioritas APBN 2023. Di mana bidang pendidikan adalah masuk dalam 5 prioritas belanja negara, maka selayaknya agar fungsi anggaran benar-benar dapat menjawab kebutuhan dunia pendidikan saat ini.

Nah, ada beberapa catatan yang kami ingin sampaikan untuk program PAUD dan wajar 12 tahun, wajib belajar 12 tahun. Yang pertama Program Indonesia Pintar, dalam program ini kami meminta ada kenaikan, baik dalam jumlah maupun dalam kenaikan nominal bantuan. Ini penting agar nilai bantuan tersebut benar-benar dirasakan kemanfaatannya, terutama bagi peserta didik daerah 3T. Dan kami juga mempertanyakan proses kelayakan yang merupakan kewenangan dari Kemendikbudristek ini, melalui operator sekolah dan dalam pelaksanaan pengajuan aspirasi itu hanya mengacu pada apa yang tertera di website PIP. Sehingga kelayakan peserta didik untuk dapat diajukan bukanlah kewenangan dari *stakeholders*, akan tetapi sudah melalui hasil evaluasi dari operator dan Puslapdik Kemendikbudristek.

Dan kemudian, terkait dengan program afirmasi Pendidikan Menengah. Nah merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kemendikbud ini, dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak Papua dan Papua Barat terbaik serta daerah 3T. Maka kami ingin agar menyarankan agar selain menjadi program prioritas dari Pemerintah Pusat, maka ada baiknya agar berkoordinasi juga dengan Daerah Otonomi Khusus yang juga memiliki anggaran pendidikan karena keotonomian daerah itu. Sehingga pemanfaatannya dana pendidikan melalui dana otsus itu dapat juga dirasakan pemerataannya bagi kemajuan Pendidikan Menengah termasuk juga wilayah kami yaitu di Provinsi Aceh.

Kemudian penguatan satuan pendidikan untuk 2023. Ini target pencapaian seperti apa dan kemudian program kualitas pengajaran dan pembelajaran, pada tahun 2022 ada tunjangan profesi guru non-PNS, dan juga 2023 ini apakah ini masuk ke dalam aneka tunjangan guru non-PNS, dan kegiatan sertifikasi 40.000 guru. Besaran anggaran tersebut difokuskan dalam bentuk apa saja?

Kemudian pengembangan prestasi termasuk Beasiswa Presiden. Kami ingin mendapatkan penjelasan apakah ini termasuk beasiswa yang *on going* atau bagaimana dengan program beasiswa unggulan. Dan UKT ini Pak Menteri, penting sekali, jadi dari Bang Putra dan semuanya kita meminta agar

UKT ini bisa diadakan kembali gitu. Dan kami ingin mendapatkan data terkait dengan satuan pendidikan yang mendapatkan fasilitas pendampingan, serta dalam bentuk apa saja pendampingan tersebut. Termasuk juga ada program yang baru di tahun 2023, yakni penerapan digitalisasi sekolah. Ini penting agar kami dapat setiap turun di daerah bisa mengetahui sebagai sejauh mana keterlibatan aktif sekolah, satuan pendidikan serta pemerintah daerah dalam mengakses kegiatan prioritas dari Pemerintah Pusat.

Dan kemudian kami juga ingin menanyakan program yang terkait dengan sekolah memiliki kebutuhan khusus yang ditempatkan di mana program prioritas tersebut. Program pelatihan dan vokasi, dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, kami selalu mendapatkan banyak aspirasi penguatan SMK pusat keunggulan. Nah akan tetapi kendala yang kami hadapi adalah akses. Kami meminta agar adanya penyederhanaan akses bagi SMK terutama di daerah-daerah di luar Jawa. Ini penting agar SMA bisa mendapatkan hak yang sama tanpa ada hambatan.

Kemudian program Pendidikan Tinggi, kegiatan prioritas KIP kuliah kami harap ada kenaikan jumlah penerima dan jumlah bantuan karena ini betul-betul terima kasih Mas Menteri sangat membantu, terutama di daerah 3T yang sering kami kunjungi. Kami juga ingin mempertanyakan dalam paparan ini kurangnya bahkan ada tidak ada keberpihakan kepada PTS. Ya kami harap pemerintah dapat memfasilitasi keberadaan PTS, karena PTS adalah juga bagian dari peran serta masyarakat dalam mewujudkan tanggung jawab pemerintah dalam bidang Perguruan Tinggi.

Kemudian program "Pemajuan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan". Dalam kegiatan perlindungan bahasa adalah hal yang sangat penting untuk diseriusi, mengingat keberadaan bahasa daerah yang semakin hari semakin kurang diminati dan akhirnya punah dan hal ini akibat tidak adanya kewajiban sekolah untuk memasukkan kurikulum sifatnya wajib disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Nah karena itu kami juga meminta agar sebagai bahasa bangsa yang besar yang menghargai budayanya, tiap pemerintah dapat mendorong agar dinas untuk mengembangkan bahasa daerah sebagai kurikulum wajib di satuan pendidikan dan masukan bahasa daerah sebagai muatan lokal yang harus diikuti oleh setiap peserta didik.

Kemudian program "Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan". Pada kegiatan fasilitasi pembinaan lembaga dan pemerintah desa, kami berharap agar pihak pemerintah dalam hal ini Mas Menteri dapat berkoordinasi juga dengan Kementerian terkait untuk bersama-sama memanfaatkan penggunaan dana desa, pengembangan lembaga pelestarian kebudayaan, terutama pada desa yang memiliki aset budaya cagar budaya yang berguna dalam pemajuan kebudayaan.

Dan satu lagi pertanyaan kami, fungsi fiskal sebesar 5,26 triliun itu akan diperuntukkan untuk apa dan apa targetnya? Agak rancu karena bicara ruang fiskal adalah pemerintah secara umum yang menjadikan *fiscal space*

sesuatu yang memungkinkan untuk percepatan suatu program prioritas yang ada. Mungkin juga ini mohon kami dijelaskan.

Kemudian Mas Menteri terakhir, ini mengingatkan Pak Fikri waktu kami berkunjung reses di tahun 2020, itu ada permintaan SMK penerbangan di Aceh. Mungkin bisa menjadi SMK apa untuk wilayah Sumatera gitu Pak Menteri karena mungkin nggak perlu lagi buka SMK di tempat lain.

Dan saya punya titipan surat cinta, *Alhamdulillah* sebetulnya hasil reses kami kemarin untuk peng-SK-an guru-guru honorer yang sudah lulus itu, Aceh cukup tinggi mencapai 70% lebih dan mungkin bisa menjadi contoh untuk Indonesia. Tapi dengan hal itu ada ke-*jealous*-an ada kecemburuan Pak, cemburu dari wilayah Aceh besar. Ini suratnya akan saya serahkan ke Pak Menteri.

Ada jumlah guru sejumlah sejumlah 361 orang, jadi mereka udah lulus dan sekarang ini mereka bekerja memang di tempat sekolah masing-masing. Yang mirisnya sebelum mereka lulus itu kan dapat honorinya dari pemerintah daerah Rp1 juta. Nah sekarang ketika lulus jadi itu menjadi tanggung jawab dari sekolah mereka masing-masing, jadi menggunakan dana BOS. Yang tadinya 1 juta, ada yang terima 300.000, ada yang terima hanya 600.000, jadi bervariasi. Ini kan sangat merugikan.

Nah oleh sebab itu mungkin mohon dorongan Mas Menteri melalui Pak Iwan juga untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini, ada tahap 1 dan tahap 2 yang sudah lulus dari 361 itu.

Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.

Ya silakan, foto-foto.

Mas Menteri mohon diterima aspirasi surat cinta, diizinkan ya. Fotonya dari sini Pak, ya.

Terima kasih Ibu Illiza.

Dengan demikian seluruh tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman Anggota Komisi sudah selesai. Mari kita lihat, mungkin tidak perlu kita defil-detil menjawab konsep keputusan atau kesimpulan rapat pada sore hari ini karena toh besok kita akan melakukan pembahasan. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.10, masih ada satu lagi agenda rapat kita dengan Perpustakaan Nasional.

Saya mohon kesepakatannya ketika nanti di-*share* draf keputusannya untuk bisa diterima dengan catatan bahwa kita akan melakukan pembetulan di hari-hari setelah kita melakukan konsinyering.

Apakah bisa disetujui, Mas Menteri setuju? Jadi atau tidak perlu ditayangkan? Saya kira belum siap ya, oh sudah, silakan ditayangkan Mbak, sebentar aja kita sekilas ya sebagai bagian dari upacara. Nah angka-angka nanti di diteliti, mudah-mudahan sudah benar, secara sekilas saya kira sudah benar. Kemudian terhadap Pagu Indikatif menyampaikan mendorong agar memberikan penjelasan terhadap usulan yaitu besok kita lakukan.

Menekankan kepada Kemendikbud untuk menyajikan data dengan format yang seragam, setidaknya berisi program, fungsi, sumber anggaran, jenis belanja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, agar setiap program kegiatan dapat terukur. Ini maksudnya untuk untuk besok pada saat konsinyering supaya formatnya sama.

Kemudian mendesak untuk mengalokasikan anggaran yang berkeadilan terhadap pendidikan, kok ilang, Pendidikan Swasta mulai dari jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sampai Pendidikan Tinggi, agar setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan data hasil evaluasi terhadap seluruh episode merdeka belajar, baik dari sisi anggaran maupun capaian terhadap tujuan pendidikan sebagai salah satu landasan penyusunan RKA K/L tahun 2023.

Menekankan kepada Kemendikbudristek RI untuk bersungguh-sungguh memperbaiki sistem pendataan pendidikan, mengingat ketidakakuratan data menjadi sumber dari sebagian besar permasalahan penyaluran pendidikan, bantuan pendidikan.

Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengalokasikan kembali bantuan UKT sebagai bentuk keadilan negara dalam pemulihan pendidikan tinggi, termasuk mengurangi beban siswa mahasiswa dan orang tua paska dampak pandemi.

Mendorong Kemendikbudristek untuk kajian dan evaluasi kebijakan akreditasi, utamanya terkait efektifitas atau efisiensi kinerja lembaga akreditasi mandiri dan biaya akreditasi yang membebani Perguruan Tinggi.

Mengingatkan Kemendikbudristek bahwa RKA K/L harus mencerminkan pelaksanaan amanat Undang-Undang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Ristek.

Komisi X menyerahkan laporan hasil panitia kerja formasi GTK PPPK kepada Kemendikbudristek Dikti.

Selanjutnya mendesak, loh ini yang keempat belum dilaksanakan dong Mbak. Baca aja ya, oh ya.

Selanjutnya menindaklanjuti rekomendasi Panja PPPK dan menyampaikan perkembangan tindaklanjutnya secara terus kepada Komisi X pada masa sidang berikutnya.

Yang nomor 5, Komisi X DPR RI sepakat. Komisi X dan Kemendikbudristek sepakat melakukan pendalaman materi rancangan RKA K/L dengan Eselon 1 dalam waktu dekat, dalam pembahasan tersebut Kemendikbud menyajikan data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam APBN tahun 2023, serta data peserta didik yang berpotensi *learning loss*, baik jumlah per jenjang pendidikan maupun berbasis wilayahnya.

Komisi X dan Kemendikbudristek sepakat seluruh pandangan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi X menjadi bahan rujukan dalam pembahasan dan pendalaman pokok-pokok rencana kerja pemerintahan.

Eh saya lupa Pak Fikri mau bicara ya.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X):

Nggak, nggak apa-apa ini tambah sekalian aja. Nggak sekalian karena.

KETUA RAPAT:

Ini juga *learning loss* ini.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH/WAKIL KETUA KOMISI X):

Iya, karena ada yang menunggu jadi beliau harus menunggu ganti apa namanya nunggu di Rumah Sakit. Jadi mohon maaf Bu Ketua, karena ini apa namanya amanat aspirasi. Kemarin saya mestinya bersama Pak Jumeri di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dan ternyata ada beberapa di grup-grup itu bahwa PPPK, masih PPPK yang lolos, yang lolos *passing grade* tetapi belum ada formasi. Dengan terbitnya Permenpan RB, itu mereka semakin gelisah karena tidak ada jaminan bahwa akan di akan diprioritaskan 193.000 itu.

Nah kemudian, Pemda kemarin masih tidak yakin dengan anggaran yang ada karena meskipun disebut tadi ada *ear marking*, ada apa segala macam tetapi Sekdanya kemarin hadir dan kalau harus mengalokasikan sesuai dengan formasi yang ada tidak mungkin. Sehingga mereka mengajukan formasi sesuai dengan analisa keuangan daerah. Ini saya kira perlu komunikasi lebih lanjut antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan

dengan dengan Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan, itu yang pertama. Jadi karena ini amanat saya harus sampaikan, mungkin perlu dimasukkan di situ. Jadi terutama yang ini yang sudah lolos *passing grade* dan belum ada formasi.

Kemudian yang kedua, yang 400.000 lebih, ini juga minta diperhatikan karena mereka banyak juga yang sudah mengabdikan 10 tahun lebih, tapi memang tadi istilahnya Prof Zainuddin Maliki bahwa mereka tidak lolos itu karena banyak beberapa faktor. Tetapi faktanya mereka masih mengajar, artinya tidak lolos PPPK tetapi tetap saja mereka masih digunakan. Nah sehingga saya kira perlu ada penilaian tersendiri pada 400.000 yang tidak yang belum lolos.

Kemudian yang terakhir, hari ini di tengah Raker-Raker yang sampai malam ini, itu tadi masih ada nggak tahu mungkin ada yang hadir atau mungkin secara apa namanya, menyaksikan di YouTube mungkin di *live streaming* acara ini, tenaga kependidikan Pak Iwan Syahril, yang dulu waktu di sini 2021 akan didata 2022 ada kemungkinan mau direkrut. Tetapi faktanya sampai sekarang belum ada kabar, itu tenaga kependidikan semuanya yang sering berbondong-bondong itu penjaga sekolah sama operator. Jadi ada rinciannya sebetulnya termasuk operator minta standar pendidikannya juga tidak juga terlalu tinggi, karena faktanya banyak juga operator Dapodik itu lulusan SMA mampu untuk mengerjakannya.

Nah sehingga itu rinciannya, tetapi yang di minta adalah bahwa dibuka formasi untuk tenaga pendidikan, tapi sampai sekarang Dirjenya namanya GTK Guru dan Tenaga Kependidikan. Tetapi, sampai sekarang masih diperhatikan hanya guru, tenaga kependidikan masih belum. Jadi karena ini amanat, saya sampaikan dan itu tolong kalau bisa masuk ke masuk pustakawan, laboran, kemudian tenaga tata usaha, dan seterusnya. Kalau yang di SMP ke atas, tapi kalau yang di SD kan tidak ada, SD adanya operator.

Jadi Bu, Mbak, ini mungkin masuk kesitu karena itu amanat, terima kasih Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Pak Fikri saya lupa tadi sudah dipesenin padahal.

Saya kira apa yang diamanatkan oleh teman-teman pada saat kunjungan itu sudah masuk secara material ya.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Belum dilempar ke anggota ya?

Mau ngasih usulan boleh?

KETUA RAPAT:

Sedang komen, baiklah silakan Bu Dewi silakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Di F butir F, F Fanta bukannya PAN.

KETUA RAPAT:

Ya menyenangkan bukan Partai Amanat Nasional.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Bukan, itu Fanta di Fanta mendesak Kemendikbud RI untuk tetap mengalokasikan kembali bantuan UKT, kemudian bantuan BU Beasiswa Unggulan, kan belum masuk tuh.

KETUA RAPAT:

Ya sama beasiswa S2 dan S3 kalau nggak salah ya belum ya.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Iya, program bantuan pemerintah biro keuangan itu sebagai bentuk kehadiran pemerintahan ada di dalam pendidikan di segala lini. Ya itu yang, kehadirannya udah sudah. Satu lagi yang ini, program bantuan pemerintah biro keuangan.

KETUA RAPAT:

Yang biro keuangan yang mana Mbak saudaraku?

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Di mana ya, oh adanya di dasmen tapi apa tidak boleh di campur-campur?

KETUA RAPAT:

Program bantuan pemerintah biro keuangan itu apa ya?

**SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A.,
Ph.D.):**

Ada Banpem Bu.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Di Sekjen.

**SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A.,
Ph.D.):**

Ada Banpem Bu.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Banpem betul.

KETUA RAPAT:

Oh Banpem.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Ya.

**SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A.,
Ph.D.):**

Sebenarnya sudah Bu sudah disediakan.

F-PAN (drh. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Program Bantuan Pemeritah.

**SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A.,
Ph.D.):**

Nggak keliatan disini yang tidak masuk sebagai prioritas nasional tapi sudah disediakan mungkin.

KETUA RAPAT:

Program bantuan keuangan mungkin, program bantuan keuangan.

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Bantuan bantuan pemerintah disebut nya Bu, ada di biro keuangan sudah ada, jadi tahun 2023 kami sudah mengusulkan 80 miliar Bu naik 4 kali lipat dari posisi tahun ini.

KETUA RAPAT:

Tapi tidak ada di sini ya, kita nggak bisa baca ya?

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Karena itu besok Bu kita tampilkan.

KETUA RAPAT:

Oh, besok *Alhamdulillah*.

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Karena itu bukan prioritas nasional, jadi tidak ditampilkan di dalam paparan.

KETUA RAPAT:

Mbak ini mungkin biro keuangan yang tidak perlu dicantumkan. Jadi program bantuan pemerintah, itu saja ya.

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Yang beasiswa S2 S3 itu juga masuk di dalam beasiswa unggulan Bu tidak perlu dicantumkan lagi.

KETUA RAPAT:

Beasiswa unggulan, programnya namanya beasiswa unggulan, termasuk diantaranya S2-S3.

SEKRETARIAT JENDRAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (Ir. SUHARTI, M.A., Ph.D.):

Iya beasiswa unggulan.

KETUA RAPAT

Ya cukup ya, cukup cukup. Saya kira yang lain juga cukup, Mas Menteri ada, Bu Sekjen ada, cukup. Yang di atas kayak ada yang bersuara, cukup ya.

Dengan demikian konsep keputusan Raker pada hari ini apakah dapat disetujui, setuju, Mas Menteri setuju?

Terima kasih, sebelum kami tutup kami persilakan kepada saudara Mendikbudristek untuk menyampaikan sepatah dua patah kata akhir.

Kami persilakan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA (NADIEM ANWAR MAKARIM, B.A., M.B.A.):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Yang pertama adalah bagi yang saya belum menyapa Minal Aidin Wal Faizin bagi yang pertama kali ketemu setelah bulan Ramadhan. Sekali lagi terima kasih atas semua kontribusi dan masukannya, hampir semua poin-poin tersebut akan dialami lebih lanjut dalam RDP dan saya sudah memberikan arahan untuk segera sangat transparan dan terbuka dengan informasi kita dengan rencana kedepannya dan harapannya 2023 dengan pemulihan Covid kita bisa mengakselerasi benar-bener bukan jalan lagi tapi berlari kearah reformasi pendidikan kita.

Terima kasih sekali lagi Komisi X.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Dengan berakhirnya kata akhir Mendikbudristek, maka selesai seluruh rapat, Rapat Kerja pada hari.

Dengan seizin Anggota Komisi X, saudara Mendikbudristek, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Kami tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi X, hadirin sekalian, teman-teman dari Sekretariat, para tenaga ahli dan seluruh organ yang bekerja untuk tetap semangat.

Kita masih akan ada satu lagi acara dengan Perpustakaan Nasional.
Sementara kita tutup Raker ini.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 19.32 WIB)

(KETUK PALU 3 KALI)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT


Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003